



VOLUME XII / NO. 119 / AGUSTUS 2017

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

Membangun Generasi Berkualitas

Pembangunan ekonomi sudah selayaknya dinikmati setiap warga negara tanpa terkecuali. Pemerintah terus berupaya menekan ketimpangan hingga berada pada kondisi paling minimum. Salah satunya dengan memperbaiki kualitas demografi sejak dini.



Daftar Isi



Foto Cover
Anas Nur Huda

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiani. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Diah Sarkorini, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando, Muchamad Ardani. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Dewi Rusmayanti, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muchamad Ardani, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Nur Iman, . **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 REPORTASE

11 LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA

- 15 Ketimpangan dalam Kacamata Demografi
- 18 Infografis
- 20 Menuju Indonesia Emas dengan Demografi Berkualitas
- 23 Perencanaan Keluarga dan Kesejahteraan Ekonomi
- 25 Demografi Terkendali, Masyarakat Sejahtera

WAWANCARA

- 27 Museum Nasional Merawat Kebhinekaan

POTRET KANTOR

- 30 Menjadi Pengawal Reformasi Birokrasi

FIGUR

- 32 Teknologi dan Transparansi

EKONOMI TERKINI

- 36 Potensi Likuiditas Domestik Pasca Perbaikan Ekonomi Amerika Serikat

KOLOM EKONOM

- 40 Menjaga Momentum Pertumbuhan Berkelanjutan Untuk Mengurangi Kesenjangan

GENERASI EMAS

- 44 Pencapaian Istimewa Sang Doktor Muda

OPINI

- 46 Kiprah Wanita sebagai Menteri Keuangan Rumah Tangga

REGULASI

- 48 Terkena Bencana, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Berkurang Hingga 100%

INSPIRASI

- 50 Berkarya Melalui Lagu, Tulisan, dan Puisi

RENUNGAN

- 52 Sudahkah Anda Menambah Saldo Rekening Bank Emosi?

BUKU

- 53 *The Courage to Act*

JALAN-JALAN

- 54 Berkelana ke Puncak Anjani

SELEBRITI

- 56 Hati-Hati Menyebarakan Informasi



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

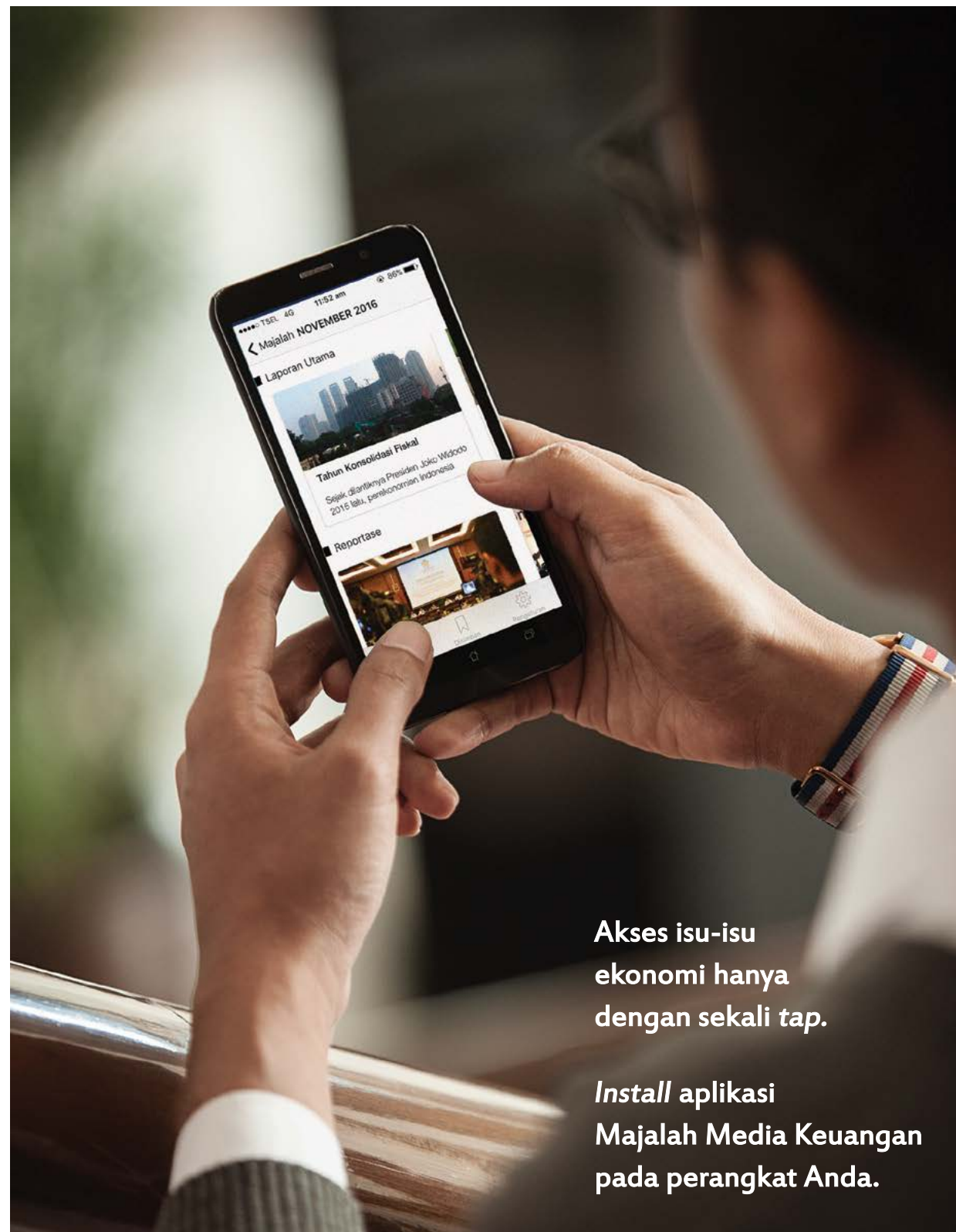
MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Akses isu-isu ekonomi hanya dengan sekali tap.

Install aplikasi Majalah Media Keuangan pada perangkat Anda.



@majalahmediakeuangan



Dari Lapangan Banteng

Memanfaatkan Peluang Bonus Demografi

Salah satu keberhasilan pembangunan bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini selaras dengan Nawacita kelima Presiden Jokowi yang menyatakan “peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia”. Melalui Nawacita kelima tersebut, terlihat komitmen pemerintah yang tinggi terhadap pembangunan manusia.

Tahun 2045, atau tiga puluh tahun dari sekarang, hampir 60 persen penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun. Dapat dikatakan, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Artinya, secara jumlah akan ada lebih banyak penduduk dengan usia produktif dan berpendidikan dibanding dengan periode sebelumnya. Bonus demografi ini bisa memberikan sinyal yang baik, namun bila tidak dimanfaatkan akan menjadi *disaster*. Apalagi, jika tidak diinvestasi dengan kesehatan, pendidikan, dan karakter, penduduk dengan usia produktif yang banyak ini akan menjadi liability, bukan aset.

Bonus demografi salah satunya disebabkan oleh laju pertumbuhan

penduduk yang tidak dikendalikan. Jika tidak dimanfaatkan, dapat menimbulkan kesenjangan dan berdampak pada kemiskinan. Penyebabnya, ketidakseimbangan jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, jumlah pangan dan nutrisi, serta kesempatan menempuh pendidikan yang tidak merata. Sebagai dampaknya, jurang antara orang kaya dan orang miskin yang diukur dengan rasio Gini, akan semakin lebar. Untuk itu, diperlukan peranan pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Pada masa Orde Baru, peranan dan fungsi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sangat populer sehingga mampu membuat program Keluarga Berencana diterima secara baik oleh masyarakat. Lembaga yang didirikan pada tahun 1970 ini telah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Tersedianya infrastruktur penunjang sosialisasi termasuk dana dan perangkat pendukung lainnya, program Keluarga Berencana dapat dilakukan secara terstruktur.

Dengan berlakunya otonomi daerah, peran sebagai pengendali pertumbuhan

penduduk beralih pada Pemerintah Daerah. Program Keluarga Berencana yang selama ini dikelola Pemerintah Pusat juga beralih kepada Pemerintah Daerah. Melihat data rasio Gini yang saat ini masih belum memenuhi harapan, dapat dikatakan bahwa fokus pemerintah daerah untuk mengedepankan program Keluarga Berencana masih sangat kurang.

Untuk mengatasi ketimpangan dan memanfaatkan peluang bonus demografi, tentunya koordinasi antar Kementerian menjadi kunci. Masing-masing Kementerian memiliki programnya sendiri, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun penyiapan lapangan pekerjaan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus berupaya memenuhi amanat Undang-Undang terkait besaran anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN. Harus ada kerjasama dan koordinasi agar tidak terjadi replikasi dan tumpang tindih kebijakan.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@kemenkeuRI

Tahun 2020-2030 Indonesia akan mengalami Bonus Demografi: penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dari usia nonproduktif. Apa yg perlu menjadi fokus pemerintah agar penduduk usia produktif ini bisa bermanfaat bagi negara?

Muh Bambang Beyono
@Bembyeah_

Memaksimalkan balai latihan yang dimiliki daerah, berikan pelajaran keterampilan yang beragam dengan sertifikasi. Selain itu juga bekali masyarakat

usia produktif dengan kemampuan bahasa Inggris karena persaingan lebih global, dan permudah pinjaman modal usaha masyarakat agar melahirkan entrepreneur dan lapangan usaha baru.

Yulianto
@yulianto_85

Pemerintah harus Membuka Lapangan kerja baru didesa-desa agar tercipta Peluang kerja yg bnyk&bisa menmbh income warga

Fajar Dwi Alfian
@FajarDwiAl

Fokus pada investasi di pendidikan, dengan cara meningkatkan kualitas belanja negara untuk pendidikan

Defile Kapal Patroli

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melaksanakan fungsi *border management and community protection* dengan melakukan konvoi kapal patroli di perairan nusantara. Tujuan konvoi ini adalah untuk menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, DJBC mengoptimalkan armada kapal patroli dan personil dari sejumlah pangkalan sarana operasional.

Foto
Dovan Wida





Resep Asli Dodol Betawi

Resep asli warisan leluhur dan cara produksi alami menjadikan industri rumah tangga dodol Betawi Sari Rasa Bu Yuyun masih bertahan hingga generasi ketiga. Industri tersebut telah dimulai pada periode 1950-an di kawasan Pejaten Timur. Proses memasak dodol pun mempertahankan cara lama, yaitu tetap memakai kayu rambutan atau sawo agar rasa cita rasa dodol tidak berubah.

Foto
Muchamad
Ardani



12/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Indonesia dalam Kerjasama Perpajakan Internasional

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka acara Konferensi Tingkat Tinggi bersama International Monetary Fund (IMF) Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta pada Rabu (12/07). Konferensi yang dihadiri oleh para pejabat tinggi di Asia, *stakeholders*, serta para ahli di bidang perpajakan internasional ini mengangkat tema “International Taxation in Asia: Issues and The Way Forward”.

Dalam pidatonya, Menkeu menyampaikan pentingnya penyelenggaraan acara ini. Bukan hanya bagi Indonesia, melainkan juga negara-negara di dunia. Konferensi ini merupakan forum bagi para pembuat kebijakan untuk membahas berbagai masalah, termasuk pentingnya reformasi perpajakan internasional.

Menurutnya, globalisasi telah menghilangkan batas-batas antarnegara untuk dapat menjalin suatu kerjasama yang lebih baik, khususnya terkait perpajakan. Dibutuhkan peraturan baru serta kerjasama dalam menghadapi tantangan

perpajakan internasional. Penguatan sistem perpajakan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan pembangunan negara.

“Adanya celah pada sistem pajak domestik telah menciptakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan maupun individu berpendapatan tinggi untuk memanfaatkannya. Hal ini tidak baik. Tidak hanya untuk penerimaan negara tetapi juga merusak rasa keadilan. Ini merupakan perhatian utama Saya saat kembali ke Indonesia dan (juga) para pemimpin dunia di G20,” jelas Menkeu.

Menkeu juga menambahkan bahwa reformasi perpajakan di Indonesia dapat dilakukan melalui hal-hal kecil seperti perbaikan dalam sistem administrasi, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebih di tengah masyarakat atas upaya pungutan pajak.

“Kebijakan penerimaan pajak yang baik, dengan (didukung) kerjasama internasional, membuat kami bisa mempertahankan penerimaan pajak yang baik,” kata Sri Mulyani.



01/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Hadiri Konvensi Indonesia Diaspora 2017

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel dengan tema “*State of The World 2017: Opportunities and Risks for Indonesia*” dalam rangkaian acara Konvensi Indonesia Diaspora 2017 di Main Hall The Kasablanka Kota Kasablanka, Jakarta (01/07). Menkeu menyampaikan, salah satu kunci sukses Indonesia di dalam menghadapi faktor eksternal global yang dapat menghambat perekonomian adalah investasi di bidang sumber daya manusia. Indonesia juga sedang memperkuat investasi di bidang infrastruktur. Menurut Menkeu, salah satu sumber pembiayaan investasi infrastruktur adalah melalui pajak dari masyarakat.



03/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Melantik Pejabat Eselon I dan II Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 15 orang pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Senin (03/07). Pada pelantikan tersebut, dilakukan serah terima jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho yang telah memasuki masa purna bakti, digantikan oleh Isa Rachmatarwata. Selain itu, terdapat 14 orang Pejabat Eselon II yang juga dilantik oleh Menkeu. Dua orang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, satu orang Tenaga Pengkaji di Sekretariat Jenderal, tiga orang Inspektur dari Inspektorat Jenderal, dan delapan orang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Lebih lanjut Menkeu juga berpesan kepada seluruh pejabat Eselon II untuk terus mengembangkan inovasi, terus menjaga kinerja dan reputasi Kementerian Keuangan sebagai institusi yang tidak hanya anti korupsi, tetapi juga bekerja dengan efektif dan efisien.

04/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Ajak Pelaku Pasar Modal Ikut PPP

Pada acara Dialog Ekonomi dengan para pelaku pasar modal yang bertempat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (04/07), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak para pelaku pasar modal untuk berdiskusi mengenai kemungkinan dikembangkannya strukturisasi proyek melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP). Tidak harus selalu dalam bentuk pinjaman, namun bisa juga berupa ekuitas. Menkeu berharap agar seluruh pihak tetap optimis dan bekerja sama untuk menjaga ekonomi Indonesia dan agar jangan terdistraksi dengan masalah politik yang sifatnya *counter-productive*. Acara ini dihadiri oleh Presiden Jokowi, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio.





Swiss Siap Bertukar Informasi Keuangan dengan Indonesia

04/07 | Teks Biro KLI Foto Biro KLI

Dalam rangka implementasi kebijakan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) untuk kepentingan perpajakan, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Swiss telah menandatangani *joint declaration* di Aula Chakti Budhi Bakti, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Selasa (04/07). Penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yvonne Baumann dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi yang disaksikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati serta Perwakilan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani dan Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri, Ridwan Hassan. Selain Swiss, negara-negara lain yang sangat penting bagi Indonesia untuk bertukar informasi adalah Singapura, Hongkong, Macau, United Kingdom, Amerika, dan Australia, dimana negara-negara tersebut merupakan *financial center* yang bisa dijadikan tempat penghindaran pajak.



11/07 | Teks Biro KLI Foto Biro KLI

Banggar DPR Menerima Usulan Asumsi Makro RAPBN 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan agenda Laporan Badan Anggaran (Banggar) atas Hasil Pembahasan tentang Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 serta pandangan fraksi atas Pertanggungjawaban APBN TA 2016 yang diajukan Pemerintah di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta pada Selasa (11/07). Pada rapat tersebut, Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin menyampaikan pokok-pokok pembahasan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 dan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2018 sekaligus menerima laporan asumsi makro dalam RAPBN 2018 yang diusulkan oleh pemerintah. Rancangan anggaran tersebut selanjutnya akan disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan pada bulan Agustus 2017.

Agenda	
08	Penanaman 1.000 pohon yang merupakan program GO Green DJPBN
16/08	Rapat Paripurna DPR RI : Presiden menyampaikan RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangan
22/08	Rapat Paripurna DPR RI: Pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangan
22/08	Seminar Keuangan Syariah di Yogyakarta
23-24/08	2nd Annual Islamic Finance Conference di Royal Ambarukmo Yogyakarta
29/08	Rapat Paripurna DPR RI : Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangan



12/07 Menkeu Apresiasi Sinergi Penanganan Impor Berisiko Tinggi

Teks Biro KLI Foto Biro KLI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penertiban Impor Berisiko Tinggi di Auditorium Sabang, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta (12/07). “Untuk bisa mencapai hasil yang optimal tentu kita terus bekerjasama dengan kementerian/lembaga yang lain. Saya sangat senang karena kepemimpinan dari Pak Kapolri, Panglima TNI, dan dari Kejaksaan Agung sangat berarti sekali bagi teman-teman di DJBC untuk bisa menertibkan di dalam pelaksanaan tugas mereka menjaga penerimaan negara, menjaga perbatasan, dan fasilitasi kegiatan ekonomi. Dan ini yang saya ingin berterimakasih setinggi-tingginya kepada Pak Kapolri, Panglima TNI, KPK, Kejaksaan Agung, PPAK, KSP (Kantor Staf Presiden),” demikian ungkapnya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penertiban Impor Berisiko Tinggi di Auditorium Sabang, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta pada Rabu (12/07)

Menkeu: Pelaksanaan Semester I APBN Lebih Baik Dari Tahun Lalu



13/07 | Teks Biro KLI Foto Biro KLI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas Laporan Realisasi Semester I Pelaksanaan APBN 2017 pada Raker bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta pada Kamis (13/07). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pelaksanaan semester I Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 telah menunjukkan kinerja yang lebih baik apabila dibandingkan APBN Tahun 2016. “Hal ini menunjukkan bahwa APBN dijaga oleh pemerintah sebagai instrumen yang efektif dan kredibel untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur.” ujar Menkeu.

15/07

Teks Biro KLI Foto Biro KLI

Menkeu Memberi Selamat kepada Dies Natalis PKN STAN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan selamat kepada PKN STAN yang merayakan Dies Natalis kedua semenjak berdirinya Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). “Ini adalah usia yang masih sangat dini, balita untuk sebuah politeknik. Namun, sebagai sekolah tinggi, STAN telah memiliki usia yang cukup lanjut. Jadi ini bukan suatu sejarah yang terputus, namun merupakan sejarah yang terus berlanjut untuk mencapai kemajuan dari kualitas pembelajaran pendidikan di PKN STAN,” ujarnya pada Sabtu (15/07) di Lapangan A PKN STAN Bintaro, Tangerang Selatan.





KETIMPANGAN DALAM KACAMATA DEMOGRAFI

Indonesia memasuki masa emas pada 2045 mendatang, tepat seratus tahun sejak Indonesia merdeka. Namun, ketimpangan yang terjadi di Indonesia memang masih cukup lebar. Akibatnya, kue pertumbuhan ekonomi belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh semua kalangan masyarakat.

Terkait hal ini, pemerintah terus menggenjot pembangunan berkualitas yang tidak menimbulkan ketimpangan. Fokus pemerintah adalah bagaimana caranya agar pembangunan ekonomi bisa dirasakan manfaatnya. Tidak terbatas pada kelompok kalangan tertentu, melainkan semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali.

Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka di awal tahun 2017 sudah menekankan fokus pemerintah terkait hal ini. “Meskipun kita tahu angka *Gini Ratio* kita sedikit membaik, tapi dalam angka masih tinggi. Oleh sebab itu, kita harus kerja keras mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita. Baik kesenjangan antarwilayah, (maupun) kesenjangan antara kaya dan miskin. Ini menjadi konsen besar pemerintah kita ke depan,” jelasnya.

Terkait hal ini, Staf Ahli Kependudukan Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Sonny B. Harmadi, mengatakan bahwa ketimpangan dapat dianalisis dari sudut pandang demografi. Sonny membaginya menjadi dua, yakni ketimpangan antarwilayah dan ketimpangan antarwarganegara. Dalam mengatasi keduanya, intervensi pemerintah diperlukan. “Kalau ada intervensi kebijakan yang mempengaruhi kelahiran, kematian dan migrasi, itu akan punya dampak terhadap penurunan ketimpangan atau kesenjangan,” kata Sonny.

Ketimpangan antarwilayah terjadi saat penduduk dengan usia produktif berkumpul pada satu wilayah tertentu. Sementara ada wilayah-wilayah lain yang justru diisi oleh lebih banyak kelompok usia nonproduktif. Sonny memberi contoh, usia nonproduktif justru lebih besar jumlahnya di daerah-daerah tertinggal, seperti Papua. Sementara di daerah-daerah yang relatif lebih maju, kelompok usia produktif mengungguli jumlah usia nonproduktifnya. “Kalau satu daerah itu memiliki penduduk usia produktif yang besar, dia berpotensi memperoleh bonus demografi,” terang Sonny.

Program transmigrasi yang pernah gencar dilaksanakan pada era 1970-an sudah tidak lagi relevan dilaksanakan. “Tidak perlu

Wilayah perkotaan jadi Favorit Penduduk Usia Produktif.

Foto
Anas Nur
Huda

kita sengaja memindahkan orang. Jadi kita bisa mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru,” jelas Sonny.

Ketimpangan Keluarga

Sementara itu, Kepala Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia, Turro S. Wongkaren melihat ketimpangan yang terjadi antarwarga negara dapat dilihat dari lingkup keluarga. “Salah satu hal yang memperburuk perekonomian keluarga adalah kalau keluarga (ataupun rumah tangga) memiliki banyak anak. Hal ini akan menyebabkan keluarga tersebut harus bekerja lebih keras hanya untuk mempunyai pendapatan per kapita tertentu dibanding dengan keluarga lain yang memiliki anak lebih sedikit,” jelasnya.

Akibatnya, anak dengan jumlah keluarga yang banyak, perlu membagi sumber daya yang ada dengan anggota keluarga yang lain untuk memenuhi kualitas kehidupannya. Tidak dapat dipungkiri, keluarga miskin cenderung memiliki jumlah anak yang lebih banyak jika dibandingkan dengan keluarga nonmiskin.

”Fertilitas mempunyai *gradien income*. Orang yang lebih tinggi *incomenya* biasanya berhubungan positif dengan lebih sedikit anaknya,” jelas Turro. Selanjutnya, hal ini berdampak pada sulitnya keluarga miskin dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Kondisi ini pula yang mengakibatkan ketimpangan antarmasyarakat semakin tinggi.

Untuk itu, pengaturan laju pertumbuhan penduduk masih menjadi konsen pemerintah. Dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang terakhir dilakukan pada 2012, *Total Fertility Rate* (TFR) Indonesia sebesar 2,6. Jumlah ini masih lebih tinggi dari target sebesar 2,1. Namun, ukuran TFR untuk tiap provinsi berbeda-beda.

“Jadi provinsi yang TFR-nya tinggi, itu tetap kita usahakan untuk tetap program

KB,” kata Turro. Dia menambahkan, kemungkinan besar memang sudah saatnya Indonesia tidak lagi melakukan *one policy fits all*. Beberapa wilayah dengan TFR yang berada di bawah 2, seperti Yogyakarta, perlu ditingkatkan TFR-nya agar tidak kebablasan. “Jadi (kebijakan) kita lebih ke arah KIE-Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat,” lanjut Turro.

Bonus Demografi

Dalam perjalanan menuju Indonesia emas, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan bonus demografi. Kondisi yang diharapkan bisa menjadi anugerah, di mana kelompok usia produktif lebih banyak jumlahnya dibandingkan kelompok usia nonproduktif.

Terkait hal ini, Turro menjelaskan makna bonus demografi. “Istilah itu diartikan sebagai kondisi demografi yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Biasanya, yang dipakai sebagai ukuran adalah rasio ketergantungan, yaitu rasio antara penduduk usia nonproduktif (usia 0-14 dan lebih dari 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun),” jelas Turro.

Puncak demografi, menurut Turro, akan terjadi pada awal 2030-an. Pada masa ini, penduduk usia produktif lebih banyak jumlahnya, secara relatif, dibandingkan dengan periode lain. Sayangnya, ukuran tersebut tidak serta merta menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan tidak banyak penduduk usia 65 tahun yang masih sangat produktif. Begitupun sebaliknya. Tidak sedikit penduduk usia 15-64 tahun yang tidak produktif. “Apabila kelompok usia produktif benar-benar produktif, akan *favorable* terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak, akan jadi masalah,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Sonny, “Penduduk usia produktif itu kan baru sekedar potensi. Bahwa dia benar-benar

produktif atau tidak tergantung apakah dia bekerja atau tidak,” kata Sonny. Makna produktif, menurut Sonny, bukan sekadar usia, melainkan benar-benar bekerja. Bahkan, sesuai kompetensi dan preferensinya. Dengan demikian, produktivitasnya bisa lebih tinggi.

Memanfaatkan Potensi

Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) sudah tentu menjadi hal yang krusial dalam menekan ketimpangan dan memanfaatkan momentum bonus demografi. Dalam seminar UMKM pada Senin (3/4) di Kantor Pusat PT Astra International, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kebutuhan Indonesia untuk berinvestasi pada peningkatan kualitas SDM.

“Pada 2045, (atau) 30 tahun dari sekarang, hampir 60 persen penduduk (Indonesia) berusia di bawah 30 tahun. Jika tidak diinvestasi dengan kesehatan, pendidikan, dan karakter, akan menjadi *liability*, bukan aset,” kata Menkeu.

Hal ini sejalan dengan Program Nawacita yang diusung Presiden Jokowi. Pada butir kelima Program Nawacita disebutkan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Diantaranya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini kemudian dirumuskan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Visi negara untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur dipetakan dalam misi dalam RPJMN. Satu diantaranya adalah dengan mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Pendidikan dan Keahlian

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus berupaya memenuhi amanat Undang-Undang terkait besaran anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN.



Peningkatkan kualitas, hak seluruh anak Indonesia.

Foto
Adhi Kurniawan

Pada tahun ini, alokasi anggaran pendidikan dari APBN mencapai angka Rp416,1 triliun. Alokasi difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan.

Terkait hal ini, Vivi Alatas, *Lead Economist* Bank Dunia, mengapresiasi usaha pemerintah dalam mengalokasikan dana sebesar 20 persen. Namun, pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada sektor pendidikan nonformal. Menurut Vivi, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak terbatas pada pendidikan formal atau pendidikan dasar. Vivi memandang perlunya memberikan kesempatan kedua, bagi warga negara yang tidak lagi bersekolah untuk meningkatkan produktivitas mereka.

“Jadi *balance* antara yang fokus kepada formal education, maupun memberikan kesempatan kepada orang yang sudah di lapangan kerja atau yang sedang mencari kerja untuk terus mengembangkan *skill* dan produktivitasnya, sehingga bisa lebih bersaing,” terang Vivi. Hal ini, menurut Vivi, bisa lebih meningkatkan kesejahteraan bagi

setiap orang, sehingga menurunkan ketimpangan.

Vivi melanjutkan, perubahan pada teknologi yang semakin berkembang menuntut adanya keahlian yang memadai. Untuk itu, pemerintah perlu melihat apa saja keahlian yang paling diperlukan pada 10-20 tahun ke depan. Sebab menurut Vivi, keahlian yang ada saat ini bisa jadi bukanlah keahlian yang paling dibutuhkan. “Pemerintah perlu melihat apa *skill* yang dibutuhkan, teknologi abad 21 seperti apa yang butuh lebih ditingkatkan,” jelas Vivi. Dengan demikian, pada saatnya nanti pemerintah telah memiliki *supply* tenaga kerja dengan kualitas yang baik.

Tenaga Kerja dan Infrastruktur

Selain dalam hal peningkatan kualitas manusia, Turro meyakini ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja harus terus menjadi perhatian pemerintah. Utamanya dalam menampung potensi besar kelompok usia produktif. Kawasan Ekonomi Khusus yang dibangun pemerintah di sejumlah daerah untuk memberikan “gula” bagi

masyarakat dinilai cukup positif. Sejumlah regulasi dan perizinan usaha juga harus disederhanakan sehingga memudahkan warga negara yang ingin berusaha.

Selain ketenagakerjaan, Turro mendukung pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dibangun pemerintah. Dia melanjutkan, pembangunan infrastruktur sangat penting karena memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang tidak terpusat pada beberapa wilayah saja, khususnya infrastruktur bidang transportasi dan komunikasi. “Selain itu, kemudahan meningkatkan perasaan ke-Indonesiaan melalui proses yang disebut *imagined community*,” kata Turro.

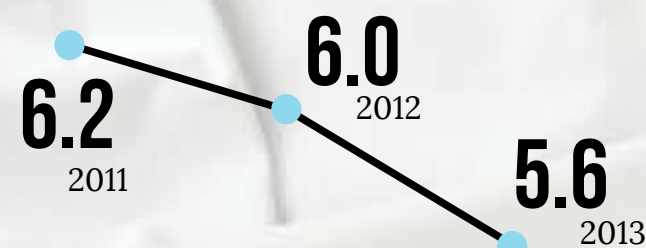
Hal senada juga disampaikan Sonny. Menurutnya, pembangunan infrastruktur adalah hal krusial dalam membuka konektivitas antarwarga dan antarmasyarakat. Pembangunan infrastruktur, lanjutnya, bukan semata memenuhi kebutuhan korporasi, melainkan membuka keterisolasian rakyat. “Jadi sudah betul apa yang dilakukan pemerintah dengan mendorong konektivitas. Dan konektivitas itu bukan hanya dari daerah *hub* ke *hub*, dari daerah utama ke daerah utama, tapi (juga) antardaerah pinggiran,” papar Sonny.

Konektivitas, yang dibangun pemerintah menjadi jalan bagi lebih terbukanya akses masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi karena sulit untuk dijangkau, kini sudah lebih mudah aksesnya. Dengan cara ini, ketimpangan antarmasyarakat bisa diminimalkan.

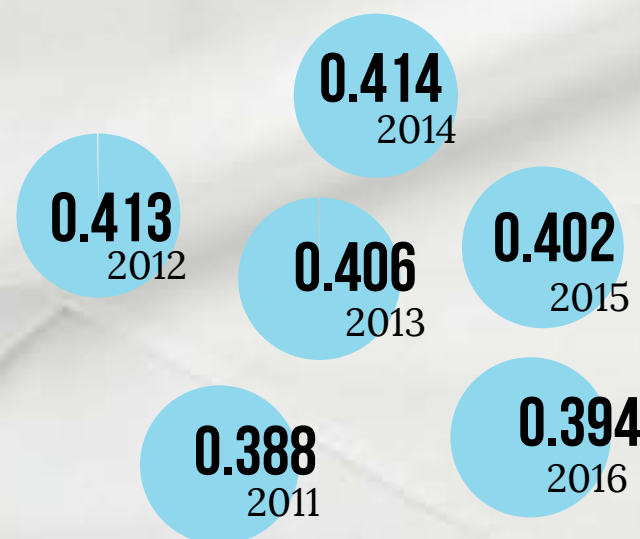
Teks Farida Rosadi

KERJA KERAS DEMOGRAFI BERKUALITAS

2011-2016
PERTUMBUHAN EKONOMI



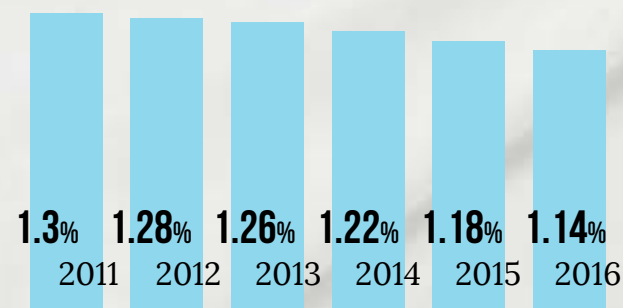
2011-2016
GINIRASIONAL



Sumber: Badan Pusat Statistik

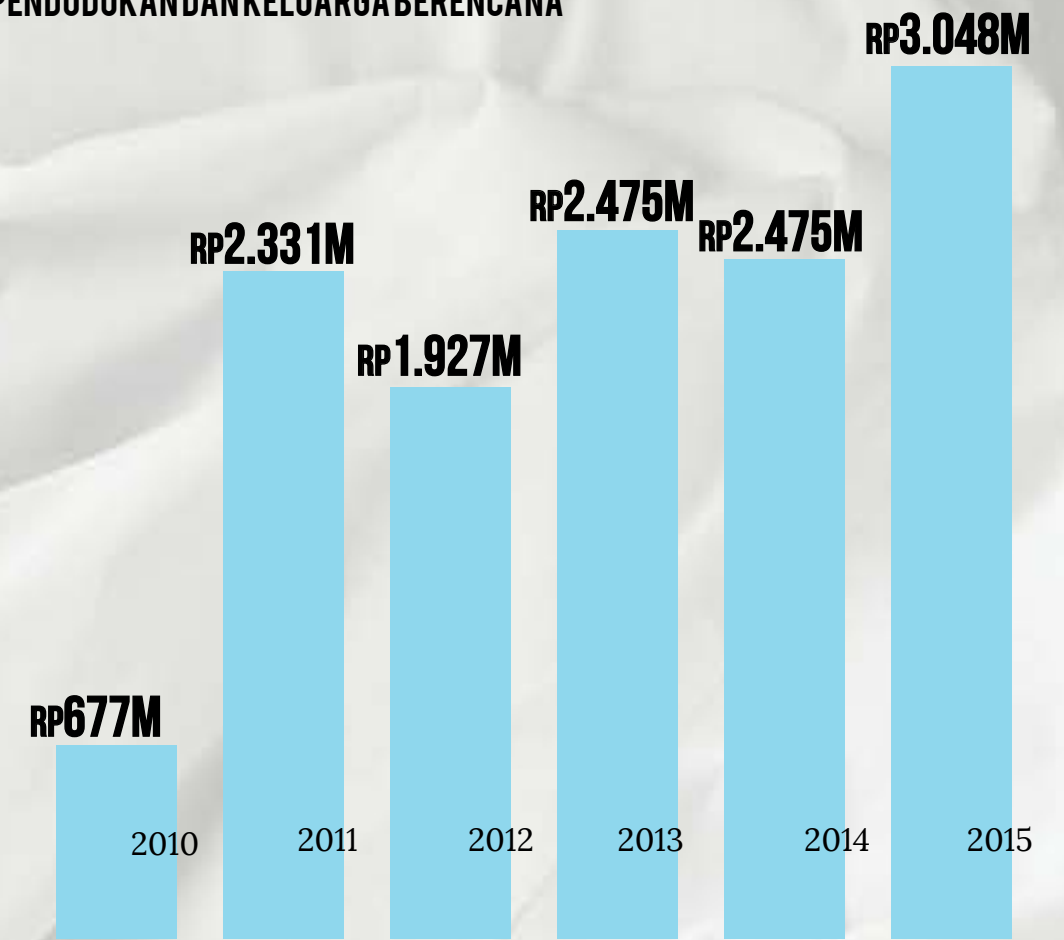
Dalam beberapa tahun yang akan datang, demografi Indonesia diperkirakan akan menjadi bonus bagi bangsa ini. Namun apabila tidak dikendalikan dengan tepat, bonus demografi justru akan menjadi bencana. Tingkat pertumbuhan penduduk memang semakin menurun. Akan tetapi, turunnya tingkat pertumbuhan penduduk tidak diiringi dengan turunnya angka kesenjangan ekonomi masyarakat maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk bekerja keras menuntaskan kesenjangan ekonomi masyarakat agar demografi yang berkualitas mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2011-2016
PERTUMBUHAN PENDUDUK



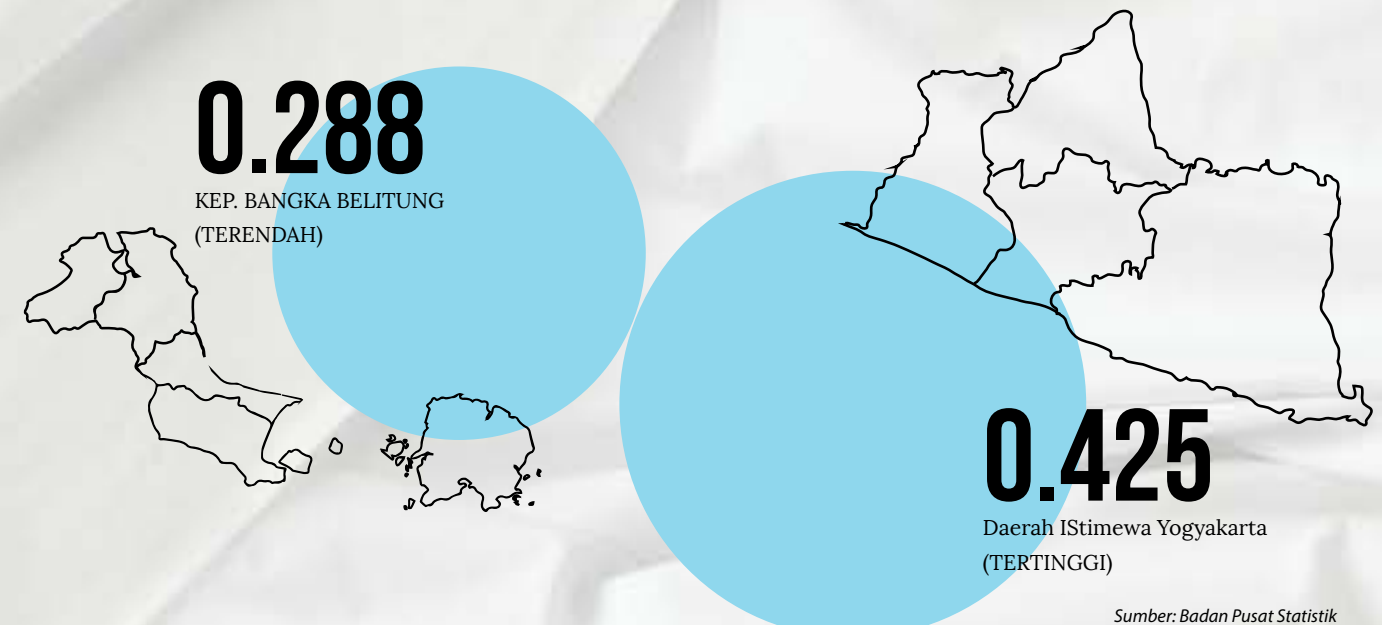
Sumber: World Bank

Pagu BKKBN 2010-2015:
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA



Sumber: DJA

Tertinggi dan Terendah
GINIRASI DAERAH PER SEPTEMBER 2016





MENUJU INDONESIA EMAS DENGAN DEMOGRAFI BERKUALITAS

Tanggal sebelas Juli yang lalu, dunia melalui Organisasi Kependudukan PBB, *The United Nations Population Fund* (UNFPA), memperingati hari kependudukan dunia (*world population day*). Dalam acara 2017 *Family Planning Summit* di London, *Acting Executive Director* dari UNFPA, Natalia Kanem, dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa program perlindungan kesehatan reproduksi seperti program perencanaan keluarga, dapat mendorong ekonomi dan berkontribusi terhadap sasaran pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development goals*) dengan cara memberdayakan

wanita melalui pendidikan sehingga mereka dapat bergabung dengan angkatan kerja dan meningkatkan produktivitasnya. Harapannya, mereka dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan ekonomi mereka melalui kemampuan tabungan dan investasi keluarga yang meningkat.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional, pemerintah mencanangkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganas). Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat terhadap

pentingnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Butir kelima Nawacita dari Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan “peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia”. Butir ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk pembangunan manusia karena pembangunan manusia akan menentukan kemajuan Indonesia. Indonesia tidak cukup dibangun dengan pertumbuhan ekonomi semata tanpa menghadirkan kesejahteraan dan pemerataan yang berkeadilan.

Diperkirakan saat puncak bonus demografi 2030, sepertiga ekonomi Indonesia akan ditopang oleh angkatan kerja usia produktif.

Foto
Anas Nur Huda

Ketimpangan nasional dan daerah

Lead Economist Bank Dunia, Vivi Alatas, menjelaskan bahwa pada dasarnya ketimpangan ekonomi itu merupakan *gap* antara yang kaya dan yang miskin. Sementara itu, salah satu indikator untuk mengukurnya adalah dengan menggunakan *Gini Ratio*. Untuk dapat menurunkan *gap* tersebut, pertumbuhan penduduk yang relatif lebih miskin diharapkan lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk yang relatif lebih kaya. Lebih lanjut, yang menjadi persoalan saat ini apabila pertumbuhan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang tidak memberikan kesempatan yang sama antara orang yang ada di distribusi kelompok bawah dengan yang berada di distribusi kelompok atas.

Hal itu penting terkait dengan pemerataan kesempatan yang sama dalam menurunkan ketimpangan di masyarakat, serta menghindari pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sebagai contoh, akses ke pasar tenaga kerja memang memerlukan produktivitas yang sepadan. Semua orang yang melakukan usaha lebih keras menjadikan dirinya lebih layak untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Namun demikian, di sisi lain yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya peningkatan pemerataan kesempatan yang sama agar setiap individu dapat bersaing dengan lebih adil. Kesempatan yang sama ini dimulai dari lingkup keluarga hingga pemerataan kesempatan dalam bekerja. “Jadi yang diinginkan bukan menjadikan orang kaya tumbuhnya menjadi sedikit, tetapi lebih memberikan kesempatan yang sama kepada semua lapisan untuk bisa tumbuh dengan baik”, jelas Vivi.

Sementara itu, ketimpangan nasional pada dasarnya merupakan sumbangan dari adanya ketimpangan di daerah. Salah satu cara untuk menurunkan ketimpangan tersebut adalah dengan memperbaiki perekonomian masyarakat miskin dengan perencanaan keluarganya secara lebih baik. Staf Ahli Kependudukan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sonny B. Harmadi, menjelaskan bahwa dalam era otonomi daerah, program perencanaan keluarga seperti Keluarga Berencana (KB) bukan lagi menjadi isu yang menarik bagi pemerintah daerah untuk dijadikan prioritas utama. Oleh karena itu, agar dapat mendorong peran serta dari pemerintah daerah dalam menyukseskan program perencanaan keluarga, ia menyarankan agar program seperti Dana Alokasi Khusus dijadikan sebagai insentif pemerintah daerah dalam memahami prioritas pembangunan.

Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Putut Hari Satyaka menambahkan sejak tahun 2016, pemerintah

telah melakukan reklasifikasi dan *refocusing* Dana Transfer Lainnya selain Dana Insentif Daerah menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dalam DAK tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mendukung perencanaan keluarga di daerah melalui Belanja Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). BOK dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya terkait pelayanan di puskesmas. Sementara itu, BOKB dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana serta kesehatan reproduksi. Tercatat pada APBN tahun 2017, pemerintah mengalokasikan Rp292,8 miliar atau naik 57,3% dari realisasi APBN tahun 2016. Sasarana dari anggaran tersebut adalah terwujudnya 4.856 balai penyuluhan KB, 20.740 fasilitas KB dan 508 kampung KB di seluruh Indonesia.

Ketimpangan dalam keluarga

Sonny menambahkan dari sisi ketimpangan atau kesenjangan dapat pula dianalisis dari sudut pandang demografi. Menurutnya, intervensi kebijakan yang mempengaruhi kelahiran, kematian, dan migrasi akan mempunyai dampak terhadap penurunan ketimpangan. Ketimpangan dapat dilihat dari segi antarindividu, antarkelompok masyarakat, ataupun antarwilayah. Ketimpangan-ketimpangan tersebut akan menjadi lebih lebar apabila tetap dibiarkan secara alamiah. Untuk itu, diperlukan intervensi dari pemerintah agar yang miskin dapat mengejar ketertinggalan dari yang kaya. Pemerintah harus memutuskan mata rantai kemiskinannya dengan cara memperbaiki kualitas anak-anaknya.

Menambahkan hal tersebut,

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty, menjelaskan bila dilihat dari pengeluaran rata-rata perkapita, secara ekonomis, jumlah anak yang sedikit dalam suatu keluarga berarti mengurangi beban keluarga. Setidaknya, beban ekonomi keluarga yang memiliki jumlah anak sedikit akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan beban ekonomi keluarga yang memiliki anak lebih banyak. Jumlah anak yang terencana dan lebih sedikit mempengaruhi pengeluaran keluarga untuk biaya pendidikan, belanja makanan, dan sebagainya.

“Dengan jumlah anak yang lebih sedikit maka akan ada tabungan keluarga yang tentunya ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan membentuk keluarga yang kecil maka akan menjadi berkualitas karena terpenuhi kebutuhan sosial dasarnya, seperti gizi anak, kesehatan, pendidikan dan tabungan keluarga”, jelas Surya.

Di sisi lain, Vivi, *Lead Economist* Bank Dunia menambahkan dari hasil penelitiannya, rata-rata jumlah ukuran keluarga di Indonesia menurun. Namun penurunan tersebut ternyata berbeda antara yang kaya dengan yang miskin. Jumlah anggota keluarga yang kaya menurunnya jauh lebih drastis dibandingkan dengan keluarga miskin yang laju penurunannya sangat lambat. Menurutnya, apabila tingkat penurunan ini bisa sama dalam lajunya antara yang kaya dan yang miskin, maka koefisien gini minimal akan menjadi lebih rendah. Artinya, dalam hal ini, peran dari perencanaan keluarga (*family planning*) menjadi sangat penting. Menurut Vivi, dalam perencanaan keluarga, tidak hanya terkait program Keluarga Berencana (KB) dan literasinya, tetapi yang

PERENCANAAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI



Meraih kesejahteraan ekonomi merupakan impian setiap negara. Namun, tidak semua keluarga dapat mewujudkan hal ini. Di Indonesia kesenjangan ekonomi antargolongan penduduk kaya dan miskin masih menjadi pekerjaan rumah. Badan Pusat Statistik

(BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh *Gini Ratio* sebesar 0,393 pada Maret 2017. Salah satu faktor yang mengganjal tercapainya pemerataan

Keluarga Kecil Sejahtera.

Foto
Anas Nur Huda

tak kalah penting lainnya adalah terkait peningkatan kesehatan, pengendalian *mortality rate*, serta *maternal mortality rate*.

Ketimpangan angkatan kerja

Sementara itu, selain menurunkan ketimpangan dalam keluarga, Vivi mengungkapkan bahwa untuk mengatasi ketimpangan dalam jangka panjang, manusia perlu memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan produktivitasnya. Menurutnya, pemerintah sudah memiliki kebijakan yang baik melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah mengalokasikan 20 persen dari anggarannya untuk bidang pendidikan. Namun, ia menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan aspek terkait kualitas dari belanjanya tersebut. Hal itu menjadi penting mengingat di satu sisi diperlukan peningkatan produktivitas dari angkatan kerja yang ada. Tetapi secara bersamaan diperlukan kesempatan yang sama dalam peningkatan pendidikan dan akses terhadap pekerjaan yang perlu diatur atau disediakan oleh pemerintah.

Untuk itu, dalam jangka pendek, menurut Vivi diperlukan peningkatan *skill* dan kesempatan bagi angkatan kerja. *Supply* dari sisi penyediaan pelatihan-pelatihan tersebut perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, seringkali pelatihan yang diberikan masih berbasis pada hal yang bukan paling dibutuhkan di pasar kerja. Padahal pada saat yang sama banyak perusahaan kesulitan mencari tenaga-tenaga yang memiliki *skill* dibandingkan dengan tenaga-tenaga yang *non-skill*. Solusinya, ia menyarankan agar dapat dilakukan kerja sama penyediaan pelatihan melalui skema *public private partnership*. “Kerjasama antara

pengusaha, pemberi *training*, dan pemerintah kemudian dengan pekerja itu sendiri sangat penting disini. Untuk memastikan bahwa *training*-nya ada, perusahaannya mau mendorong ke arah itu, kemudian juga para pegawainya mau terus belajar. *Life long learning*”, jelasnya.

Bonus demografi

BKKBN memproyeksikan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara dengan angkatan kerja produktif terbanyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, atau yang lazim disebut dengan bonus demografi. Kepala BKKBN, Surya, mengungkapkan bahwa berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia periode 2010–2035, Indonesia sebenarnya sudah memasuki periode bonus demografi pada tahun 2012. Hal ini ditandai dengan rasio ketergantungan (*dependancy ratio*) yang berada bawah 50 persen. Pada tahun 2010, angka rasio ketergantungan tercatat sudah mencapai angka 50,5 persen Artinya, setiap seratus angkatan kerja produktif menanggung 50,5 orang penduduk yang bukan usia produktif.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pada puncak bonus demografi 2030, Indonesia akan menikmati puncak jendela kesempatan (*window of opportunity*), dimana rasio ketergantungan mencapai angka terendah sekitar 44 persen. Menurutnya, *window of opportunity* hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan penduduk Indonesia apabila empat prasyarat terpenuhi, yaitu penduduk berkualitas, penduduk usia produktif terserap dalam pasar kerja, meningkatnya tabungan di tingkat rumah tangga, serta meningkatnya akses perempuan terhadap pasar kerja. “Yang menarik dari bonus

demografi adalah keuntungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sepertiga dari pertumbuhan ekonomi disumbang dengan adanya bonus demografi”, jelasnya.

Menambahkan hal tersebut, Sonny, Staf Ahli Kependudukan Kemenko PMK menjelaskan bahwa saat bonus demografi tercapai, penduduk usia produktif akan mempunyai proporsi yang cukup besar. Penduduk tersebut mempunyai energi yang besar dan perlu disalurkan secara positif, baik dengan cara melalui pendidikan formal di sekolah, maupun dengan bekerja secara produktif. “Penduduk usia produktif itu *kan* baru sekedar potensi. Bahwa dia benar-benar produktif atau tidak tergantung apakah dia bekerja atau tidak”, jelasnya.

Aging population dan middle income trap

Bonus demografi diperkirakan akan berakhir pada tahun 2045. Saat itu, mayoritas angkatan kerja akan memasuki *aging population*, tepat pada 100 tahun Indonesia merdeka. Sonny menjelaskan bahwa pemerintah perlu menekan angka kelahiran namun jangan sampai berada di bawah *replacement level*. Tujuannya adalah agar mencapai keseimbangan populasi penduduk yang terkendali secara berkelanjutan. Selain itu, agar bonus demografi yang menua tersebut mampu menjadi penduduk lanjut usia (lansia) yang tidak tergantung pada penduduk usia produktif. Menurut Sonny, hal itu dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, mereka dapat bekerja pada bidang yang tidak membutuhkan banyak aktivitas fisik. Yang kedua, mereka diharapkan sudah menjadi lansia yang kaya dan memiliki tabungan dan investasi yang memadai.

Di sisi lain, bonus demografi dapat menjadi musibah apabila tidak dikendalikan dan dipersiapkan secara baik. Salah satu risiko dari bonus demografi ini adalah terjebaknya Indonesia dalam pendapatan kelas menengah (*middle income trap*). Untuk itu, Sonny menilai pemerintah saat ini memegang kendali yang sangat besar terhadap keberhasilan pengelolaan bonus demografi. Apabila pemerintah berhasil memanfaatkan periode ini dengan baik, maka Indonesia dapat keluar dari *middle income trap* pada tahun 2028. Menurutnya, untuk mencapai bonus demografi kembali dalam suatu negara diperlukan waktu yang sangat lama. “Tidak akan bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah tadi kalau bonus demografi tidak dimanfaatkan”, ungkapnya.

Teks Abdul Aziz

"BPJS Kesehatan harus bisa memastikan semua warga negara memiliki akses layanan kesehatan dengan kualitas yang cukup."

Vivi Alatas
Lead Economist
Bank Dunia,

ekonomi adalah laju pertumbuhan penduduk. Sebenarnya program Keluarga Berencana (KB) yang mengusung slogan 'dua anak cukup' dan dilaksanakan sejak tahun 1970 sudah dapat dilihat hasilnya. Indonesia berhasil menurunkan angka *total fertility rate* (TFR) atau jumlah anak dari setiap wanita Indonesia dari 5,6 pada awal tahun 1970-an menjadi 2,6 pada tahun 2012 menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

Namun tingkat kelahiran ini masih tinggi. Menurut Badan Kependudukan dan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) idealnya TFR Indonesia sebesar 2,1. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, salah satu penyebab pengendalian penduduk belum sesuai harapan adalah karena sejak desentralisasi fiskal banyak pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk program KB. "Karena itu kita akan mulai melakukan sentralisasi program KB dan anggarannya kita amankan," kata Menkeu.

Pelimpahan penyuluh dari daerah kembali ke pusat yang rencananya akan dilaksanakan akhir 2017 tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini terdapat 4 sub urusan yang menjadi kewenangan bersama pemerintah pusat dan daerah yakni program pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi penyuluh KB. Program KB tidak lepas dari strategi pembangunan ekonomi agar struktur penduduk Indonesia sebagai aset pembangunan lebih berkualitas.

Wendy Hartanto, Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN menceritakan, sebelumnya BKKBN memiliki sekitar 40 ribu orang penyuluh KB yang tersebar hingga ke desa-desa. Mereka bertugas mensosialisasikan dan memetakan penggunaan kontrasepsi yang tepat sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Namun sejak era otonomi daerah, jumlah petugas tersebut menyusut dan tersisa sekitar 15 ribu saja karena banyak diantara mereka yang dipindahkan ke tempat tugas baru.

Dijelaskan Wendy lebih lanjut, tidak semua Pemda memiliki prioritas yang sama mengenai kependudukan. Berbeda dengan pembangunan fisik, membangun

manusia tidak hanya membutuhkan dana yang cukup besar namun juga waktu yang lama untuk dapat terlihat hasilnya. "Masih beruntung BKKBN mempunyai perwakilan di provinsi sehingga masih bisa kita kendalikan. Kantor vertikal kami bekerjasama dengan Pemda untuk menjalankan programnya. Kita harapkan daerah itu juga menganggarkan," tuturnya.

Wendy mencontohkan, saat ini daerah yang memiliki program kependudukan cukup baik adalah Bojonegoro dan Sukabumi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kedua kabupaten tersebut memberi anggaran yang memadai untuk berbagai program perencanaan dan pembinaan keluarga. "Semua bupatinya sangat peduli. Di sekolah-sekolah di Sukabumi bahkan ada pendidikan kependudukan bagi siswa SMP dan SMA. Tujuannya supaya mereka paham tentang lingkungan, kesehatan reproduksi, beserta dampaknya," kata Wendy.

Lead Economist Bank Dunia, Vivi Alatas mengingatkan, program pengendalian penduduk harus memperhatikan sisi permintaan, sebab perencanaan keluarga pada akhirnya menjadi keputusan individu. Desain program KB perlu mendorong perubahan perilaku yang akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. "Jadi bukan sekedar perubahan alokasi dana pemerintah, tetapi yang lebih penting penelaahan cara mengubah perilaku terkait KB yang paling efektif, terutama bagi orang yang belum tahu, belum mau, atau belum mampu.

Vivi menambahkan, program KB bukan hanya bertujuan mengendalikan jumlah kelahiran, tetapi juga menurunkan tingkat kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kesehatan. "Begitu ada bencana terkait kesehatan dalam keluarga, akan sulit untuk mengembalikan ketahanan keluarga seperti semula," ujar Vivi. Sebab itu, lanjutnya, program BPJS Kesehatan harus bisa memastikan semua warga negara memiliki akses layanan kesehatan dengan kualitas yang cukup.

Teks Irma Kesuma

DEMOGRAFI TERKENDALI, MASYARAKAT SEJAHTERA



Pemerintah selama ini berupaya mengatasi kesenjangan untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan selain peningkatan layanan publik, yaitu dengan pengaturan demografi. Apabila angka kelahiran bisa terkendali di tiap provinsi, maka

kesejahteraan yang adil dan merata akan tercapai. Berikut wawancara Media Keuangan dengan Turro S. Wongkaren, Kepala Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengenai demografi Indonesia untuk mengurangi kesenjangan.

Kepala lembaga
Demografi FEB
UI, Turro S.
Wongkaren

Foto
Pradany Hayyu

"Sebaiknya anggaran tetap di bawah pemerintah daerah. Hal yang lebih efektif adalah jika penduduk yang dari provinsi dengan TFR tinggi bisa migrasi ke daerah yang memiliki TFR rendah. Sehingga persebaran penduduk lebih merata."

Turro S. Wongkaren
Kepala lembaga Demografi FEB UI

Menurut Anda, bagaimana asumsi pengaturan demografi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi?

Demografi pada intinya adalah penduduk. Proses demografi ada tiga, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam ilmu ekonomi ada *trade-off* antara kuantitas dan kualitas. Jadi kalau dalam suatu keluarga ada 5-6 orang anak yang harus dikasih makan, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar daripada keluarga yang memiliki 2-3 orang anak. Sebagian orang berasumsi jika anaknya semakin sedikit, orang tua akan memiliki kemampuan untuk membiayai kesehatan dan pendidikan lebih baik. Saya kira itu tidak linear. Pemerintah tetap membutuhkan penduduk untuk menggerakkan perekonomian namun demografi harus tetap terkendali.

Bagaimana sebaiknya pemerintah bersikap menghadapi bonus demografi pada tahun 2020-2030?

Bonus demografi itu kondisi dimana usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan kelompok umur lainnya, yakni usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Kita harus hati-hati dengan kondisi ini. Dengan banyaknya penduduk usia produktif, apakah berarti kita akan diberikan kemudahan? Menurut saya justru sebaliknya. Melihat dari sisi *supply* yang tinggi, kompetisi akan semakin meningkat. Kalau dari sisi *demand* tidak berubah, maka tidak akan lagi menjadi bonus demografi, melainkan penalti demografi. Sebenarnya saat ini kita sudah memasuki masa bonus demografi, tepatnya sejak tahun 1980-an.

Jika penduduk usia 15-64 tahun itu benar-benar produktif, maka akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi. Penalti demografi akan terjadi jika kondisi ketenagakerjaan tidak kondusif. Saya pernah menghitung asumsi angka pengangguran terbuka, kurang lebih sekitar 6 persen atau 11 juta orang menganggur di Indonesia pada tahun 2030-an. Penduduk usia produktif yang berpendidikan tinggi, berbadan sehat, namun menganggur, justru tidak akan membawa manfaat dari sisi sosial dan ekonomi.

Menurut Anda, kebijakan apa yang efektif untuk menyambut bonus demografi?

Ketenagakerjaan. Bisa dengan mempermudah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan mempermudah perekrutan tenaga kerja. Di sisi lain, menurut saya, upaya pemerintah membuat Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) itu cukup bagus. Pengembangan kawasan perekonomian yang baik akan mampu

mendatangkan investor. Seperti pepatah "Ada gula ada semut." Selain itu, pemerintah juga perlu fokus pada kebijakan pengentasan kemiskinan.

Bagaimana pengendalian demografi bisa memperbaiki ketimpangan ekonomi?

Salah satunya dengan mengendalikan angka kelahiran (TFR- Total Fertility Rate). Tapi jangan sampai kebablasan juga, nanti akan menimbulkan permasalahan baru. Untuk provinsi yang TFR-nya tinggi, tetap kita promosikan program Keluarga Berencana. Lalu, untuk menekan angka kematian ibu, pemerintah diharapkan bisa memperhatikan kesehatan ibu sejak mengandung hingga 1000 hari pertama setelah melahirkan. Menurut saya bahkan sebaiknya dari 1000 hari pertama sejak masa kandungan, karena saat itu kognitif janin sudah terbentuk. Sejak di kandungan, janin sudah harus diperhatikan masalah kesehatan dan pendidikannya.

Menurut Anda, bagaimana bila anggaran pengendalian penduduk yang selama ini diberikan ke pemerintah daerah ditarik ke pemerintah pusat agar bisa tersalurkan lebih optimal?

Sebaiknya anggaran tetap di bawah pemerintah daerah. Hal yang lebih efektif adalah jika penduduk yang dari provinsi dengan TFR tinggi bisa migrasi ke daerah yang memiliki TFR rendah. Sehingga persebaran penduduk lebih merata.

Apa harapan Anda terhadap pemerintah terkait kualitas pemerataan penduduk dan upaya mengurangi ketimpangan?

Saya berharap koordinasi antar-kementerian/ lembaga bisa diperbaiki. Akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat diharapkan bisa lebih terkoordinasi dengan baik. Hal yang lebih penting, rencana pembangunan di tingkat nasional sebaiknya selaras dengan rencana pembangunan di tingkat daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebaiknya selaras dengan RPJM Daerah. Jadi kalau memang mau membuat rencana sebaiknya dilakukan bukan dengan tujuan dananya terserap atau tidak. Evaluasi yang dilakukan bukan hanya evaluasi proses tersebut sudah dilakukan atau belum. Namun lebih ke arah evaluasi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan.

Teks Pradany Hayyu



Wawancara

Museum Nasional Merawat Kebhinekaan

Merawat peninggalan sejarah merupakan bagian krusial dari pendidikan kebangsaan. Dalam hal ini koleksi museum dapat memberikan representasi perjalanan peradaban. Ditemui di kantornya, Dedah Sri Handari, Kepala Bidang Kemitraan dan Promosi Museum Nasional menceritakan bagaimana situs kebanggaan Indonesia tersebut menjadi pusat kajian sosial budaya yang beranekaragam sekaligus tempat rekreasi.

Foto
Anas Nur Huda

Seperti apa keistimewaan sejarah Museum Nasional?

Museum Nasional bersifat umum. Klasifikasi benda koleksinya sangat lengkap, mulai dari era prasejarah hingga ke masa kini. Sebelumnya, kami sempat memiliki koleksi naskah kuno. Namun pada tahun 1980-an diboyong ke Perpustakaan Nasional. Pada tahun 1998 koleksi lukisan dan seni kontemporer juga dipindah ke Galeri Nasional. Sejak itu Museum Nasional hanya menyimpan benda pra-sejarah dan sejarah yang sifatnya klasik dan warisan.

Museum Nasional juga merupakan museum yang tertua di Indonesia. Awalnya, museum ini dibangun oleh cendikiawan Belanda sebagai lembaga ilmu pengetahuan, mengacu pada tren di negeri Belanda saat itu. Namun, lembaga ini berdiri sendiri sehingga pada 1778 berdirilah *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* di jalan Kali Besar, Jakarta. Lembaga penelitian ini terbuka untuk umum. Hasil-hasil penelitiannya ada beragam seperti biologi, geografi, arkeologi, antropolologi dan sebagainya. Semua dipublikasikan dan diperlihatkan ke masyarakat sehingga jadilah museum.

Lama kelamaan, koleksi hasil penelitiannya tidak tertampung lagi di Kali Besar. Ketika Thomas Raffles menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda, beliau membangun gedung baru di Jl. Majapahit No.3 yang sekarang menjadi kantor Sekretariat Negara. Saat Indonesia beralih ke kependudukan Inggris, lembaga tersebut berganti nama menjadi Literary Society. Dalam perkembangannya, lembaga ini dikembangkan khusus untuk museum. Maka pada 1862 dibangunlah gedung Museum Nasional yang ditempati hingga saat ini.

Mengapa saat ini Museum Nasional mengusung konsep dan alur tata ruang ke-Indonesiaan sepenuhnya?

Sebenarnya konsep tata pameran koleksi lama hingga proses renovasi saat ini adalah pola pemikiran Belanda. Pembagian ruang pameran masih berdasarkan bidang ilmu tersendiri. Seperti ruang prasejarah, ruang geografi, atau ruang etnografi dan antropologi. Dulu orang-orang Eropa memandang Indonesia sebagai suku bangsa yang perlu diteliti. Jadi, konsep awalnya semata dari sudut pandang mereka.

Sejak tahun 2014, kami membuat alur cerita baru yakni bagaimana memandang Indonesia dari sudut pandang Indonesia sendiri. Alur kisah ini dibagi menjadi tiga subtema yakni Menjadi Indonesia, Pusaka Nusantara, dan Lestari Indonesia. Salah satu cerita yang kami tambahkan adalah masa perkembangan Islam, sebab saat ini koleksi museum didominasi masa peninggalan Hindu dan Buddha. Pada tema Pusaka Indonesia kami akan pilih koleksi yang sudah masuk dalam daftar *intagible heritage* di UNESCO seperti wayang dan keris. Hal ini berkaitan juga dengan kebanggaan kita di dunia internasional.

Seperti apa perbandingan antara koleksi asli dan replika di sini?

Koleksi replika tidak banyak, kurang dari 1 persen. Museum Nasional harusnya menampilkan yang asli. Replika hanya dibuat kalau kita tidak bisa mendapatkan aslinya. Contohnya Prasasti Ciaruteun yang sangat besar, berat, dan masih ada di lokasi tempat ditemukan. Dalam arkeologi, kalau suatu benda masih terikat di situs aslinya, maka tidak boleh dipindah karena akan menghilangkan konteksnya. Pemindahan hanya boleh dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, misalnya

penyelamatan karena tanah di situs asli rawan longsor.

Tentunya membuat replika harus dengan pertimbangan kita memang sangat sulit memperolehnya. Contoh lainnya adalah batu gajah dari Pasemah yang baru saja dipindahkan ke Museum Provinsi Sumatera Selatan. Batu tersebut sedemikian penting dalam era *paleometalik*. Demikian pula dengan Prasasti Airlangga. Koleksi artefak itu sangat penting dalam masanya. Akhirnya dengan pertimbangan tersebut, kita buat replikanya.

Kami juga mereplika koleksi kami sendiri untuk pertimbangan keamanan. Ketika kami mengadakan museum keliling, tentunya koleksi emas asli *kan* tidak mungkin dibawa. Sebab itu kami membuat replikanya yang lebih aman untuk dibawa. Belum lama ini ada pameran di Museum Victoria and Albert di Inggris. Kami pinjamkan 3 koleksi mahkota Bali.

Barang sejarah Indonesia yang disimpan di lembaga lain, misalnya arca-arca Singosari di museum Leiden Belanda, juga dibuat replikanya. Dengan begitu masyarakat juga bisa melihat betapa adiluhungnya karya-karya manusia Indonesia di masa lalu. Contoh lain, replika bendera Pusaka yang aslinya disimpan di Tugu Monas. Kalau replikanya tidak ada maka akan ada kekosongan cerita. Jadi, replika sebenarnya penting untuk dokumentasi dan untuk melengkapi alur cerita.

Panduan seperti apa yang disediakan bagi wisatawan asing?

Sebenarnya, mengumpulkan dan menghimpun keterangan koleksi adalah tugas pengkaji dan kurator. Setelah informasi utuh baru dilakukan *transfer knowledge* ke para pemandu. Di ruang

pameran, belum semua koleksi diberi informasi yang memadai. Sebab itu pemandu harus kreatif mencari sumber informasi seandainya ada pertanyaan ini dan itu. Kami juga bekerja sama dengan pemandu dari *Indonesia Heritage Society*. Mereka sudah menyiapkan pemandu dengan kemampuan berbagai bahasa selain bahasa Inggris seperti seperti Prancis, Korea, dan Jepang. Kami bahkan sudah menyiapkan jadwal khusus untuk kebutuhan *touring* dengan berbagai bahasa.

Butuh sehari penuh untuk menjelajahi Museum Nasional. Jika pengunjung hanya memiliki waktu dua jam, apa koleksi unggulan yang wajib dilihat?

Tamu kenegaraan biasanya sudah mengirim tim untuk melakukan survei terlebih dahulu. Contohnya saat kunjungan singkat raja dan ratu Swedia baru-baru ini. Kemudian kami akan mendampingi dan mengarahkan kira-kira minatnya di koleksi apa.

Untuk tamu umum biasanya kami informasikan dulu sejarah dan gambaran Museum Nasional. Selanjutnya mereka bisa memilih mau melihat koleksi apa. Tetapi kalau mau melihat garis besarnya, biasanya kami arahkan untuk mengenal manusianya terlebih dahulu, yakni manusia purba sampai manusia masa perunggu dan besi. Selanjutnya baru kami ajak melihat bendanya, khususnya ruang khazanah yang menyimpan pusaka emas dan keramik. Kalau masih ada waktu, baru mengunjungi ruang lain yang mengenalkan budayanya.

Dari sisi *visitor experience*, bagaimana strategi Museum Nasional agar kunjungan ke museum menjadi lebih populer?

Untuk sementara, kami baru menyediakan *kid’s corner* untuk anak-anak usia dini hingga Sekolah Dasar. Setiap Selasa, Rabu, dan Kamis kunjungan anak-anak cukup padat. Di sana mereka kami ajak untuk belajar mewarnai sambil mengenal permainan dan pakaian tradisional dengan menggunakan media interaktif. Kami bekerja sama dengan Trans Jakarta. Mereka menyediakan transportasinya, kami menyediakan aktivitasnya. Sementara untuk masyarakat umum kami baru membuat *workshop* membuat batik di hari kerja. Di akhir pekan, Setiap Sabtu pukul 10.00-12.00 kami menyelenggarakan sekolah tari bernama Prajna Paramitha. Kemudian pada pukul 13.00-15.00 disambung dengan *workshop* gamelan. Teknik yang digunakan dimodifikasi dengan mempersembahkan lagu-lagu yang populer.

Bagi yang ingin belajar gamelan klasik yang betul-betul sesuai pakemnya, bisa bergabung di hari Minggu pukul 10.00-12.00. Seluruhnya gratis bagi pengunjung. Kami berencana



untuk membuka *workshop* kolintang dan sasando. Saat ini hanya menunggu adanya pengajar, sebab kolintang dan sasando cukup langka dan sulit dimainkan.

Pesan apa yang ingin disampaikan kepada pengunjung Museum Nasional?

Pesan saya kenalilah kebhinekaan budaya Indonesia. Kalau tidak kenal, tidak sayang. Kemudian banggalah dengan apa yang sudah diberikan oleh leluhur. Saya berharap, apa yang ada di Museum Nasional bisa menginspirasi seluruh masyarakat untuk berkarya. Kalau leluhur kita saja sudah bisa menghasilkan karya adiluhung, apa yang kita kemudian bisa lakukan?

Teks Irma Kesuma

Dedah Sri Handari, Kepala Bidang Kemitraan dan Promosi Museum Nasional

Foto
Anas Nur Huda



Menjadi Pengawal Reformasi Birokrasi

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Berkunjung ke sebuah kantor yang penuh torehan prestasi seakan membawa nuansa tersendiri. Semangat kerja dan inovasi yang ditunjukkan oleh jajaran pegawai KPPN Semarang II mampu menginspirasi siapapun untuk bekerja lebih giat lagi.

Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II semakin diakui sejak dinobatkan sebagai Kantor Pelayanan Percontohan Terbaik pada tahun 2011. Ajang yang pertama kali diselenggarakan dalam rangka Hari Oeang Ke-65 itu dinilai berdasarkan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat oleh Tim Penilai. Prestasi membanggakan ini menunjukkan keberhasilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dalam menjalankan Reformasi Birokrasi.

Menyusul prestasi tersebut, pada tahun 2013, KPPN Semarang II mewakili DJPB dalam penilaian Citra Pelayanan Prima Tahun 2013. Ajang yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini sukses memberikan nilai sempurna saat menilai KPPN Semarang II.

Edy Nuryadi, Kepala Kantor KPPN Semarang II, menambahkan “Pada tahun 2014, KPPN Semarang II juga mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari KemenPAN-RB serta memperoleh sertifikat ISO 9001-2008.” Prestasi demi prestasi terus datang mengapresiasi kinerja para pegawai yang berkantor di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34 Kota Semarang ini. Pada semester satu tahun 2016, KPPN Semarang II juga memperoleh penilaian prestasi tertinggi hasil pembinaan dan supervisi KPPN di lingkungan Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Tengah.

Pada penilaian yang sama, KPPN Semarang II juga mendapat predikat Peringkat I KPPN Tipe A1 Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah kategori Kualitas Tata Kelola Rencana Penarikan Dana Semester I Tahun 2016. Selain itu juga mendapat Peringkat ke-9 Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A1 DJPB.

Kantor Inspiratif

Sederet prestasi yang diraih KPPN Semarang II tak hanya membawa kebanggaan sendiri bagi para pegawai,

namun juga memberikan inspirasi bagi aparat sipil negara lainnya. Pada tahun 2015, KemenPAN-RB dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan studi banding ke KPPN Semarang II. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah menjelaskan beberapa hal berikut, yaitu optimalisasi layanan kepada masyarakat dengan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), penerapan akuntansi berbasis akrual, dan MPN G-2 di seluruh KPPN. “Semoga semangat reformasi birokrasi KPPN Semarang II menjalar ke institusi lainnya,” ujar Edy.

Meskipun lebih dari setengah jumlah pegawai KPPN Semarang II berusia di atas 50 tahun, bukan berarti inovasi dan pelayanan semakin menurun. Justru para pegawai senior tersebut sangat bersemangat untuk belajar hal-hal baru. Menurut Edy, kunci sukses prestasi KPPN Semarang II yakni semangat dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan sepenuh hati. Pelayanan yang diberikan selalu mengacu pada *Standard Operational Procedure* (SOP) dan berorientasi pada kepuasan *stakeholders*.

Sesuai dengan janji layanan “Memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, tepat, dan transparan serta tanpa biaya dan imbalan,” KPPN Semarang II selalu berbenah menuju kantor pelayanan terbaik. Demi mengemban amanah reformasi birokrasi, budaya antikorupsi dan gratifikasi sudah diterapkan dan dibangun sejak ditetapkannya KPPN Semarang II sebagai KPPN Percontohan di tahun 2007. Saat itu, KPPN Semarang II melakukan perubahan proses bisnis, tata lembaga, termasuk juga melakukan *assessment* sumber daya manusia.

Target

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu cara KPPN Semarang II untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Gugus Kendali Mutu rutin dilakukan, setidaknya seminggu sekali. Gugus Kendali Mutu merupakan ajang dimana seluruh pegawai berkumpul setiap minggu untuk membahas peraturan maupun saling memberikan pemahaman antarseksi. Selain itu juga diselenggarakan *morning call* sebagai sarana komunikasi dan penyaluran aspirasi antarpegawai.

Melayani 170 satuan kerja (satker) yang tersebar dalam 22 kementerian/lembaga di Provinsi Jawa Tengah tentu bukan perkara mudah. Cakupan wilayah kerja KPPN Semarang II meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal. Sebelum ada penilaian KPPN Percontohan pada tahun 2007, jumlah pegawai KPPN Semarang II sekitar 100-an pegawai. Setelah proses *assessment* demi memenuhi syarat KPPN Percontohan, pegawai yang lolos berjumlah sekitar 28 orang. Hingga Juli 2017, pegawai KPPN Semarang II berjumlah 41 orang.



KPPN Semarang II tak berpuas diri dengan capaian prestasi yang telah diraih. Berikut beberapa target yang akan dicapai ke depan. Pertama, KPPN Semarang II berusaha terus mengawal Reformasi Birokrasi dengan terus meningkatkan pelayanan yang terbaik, cepat, tepat, transparan, dan tanpa biaya. Kedua, KPPN Semarang II akan mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Ketiga, inovasi layanan akan terus dilakukan demi meningkatkan kepuasan *stakeholders*. “Kami selalu membuka diri untuk menerima masukan dari *stakeholders* demi peningkatkan pelayanan,” kata Edy.

Teks Pradany Hayyu

Salah satu pegawai memberikan pelayanan kepada stakeholder

Foto
Resha Aditya P.

Keluarga Besar KPPN Semarang II

Foto
Dok. Pribadi

Edy Nuryadi, Kepala kantor KPPN Semarang II

Foto
Resha Aditya P.

Teknologi dan Transparansi

Wawan Sunarjo,
Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis
Penyusunan APBN,
Direktorat Jenderal Anggaran

Berpindah-pindah tempat tinggal menjadi sebuah kebiasaan dalam menjalani hari-hari di kampungnya. Bukan tanpa alasan, ayahnya yang kala itu bertugas sebagai Camat memang mau tak mau harus bersedia dipindahtugaskan ke beberapa wilayah berbeda setelah periode tertentu. Dampaknya, anak-anaknya pun harus turut serta melakukan adaptasi di tempat tinggal baru dan mencari teman baru di sekolah barunya. Ialah Wawan Sunarjo, anak kedelapan dari sembilan bersaudara yang harus ikut dalam perjuangan pengabdian dari sang ayah. Ia kini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

Lahir di Mojokerto Jawa Timur pada 8 Agustus 1967, Wawan sudah terbiasa untuk menemani orang tuanya hidup berpindah-pindah dalam menjalankan tugasnya. Hal itu juga membuatnya merasa siap secara mental untuk menjalankan penugasan pertamanya sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan di Jayapura. Saat itu, ia sempat berpikir tidak mungkin akan menemui orang Jawa atau Sumatera di tanah Papua. Ternyata dugaannya salah. Ia menemukan banyak warung soto, bakso, mie, dan masakan khas lainnya yang menunjukkan keberadaan masyarakat yang asalnya bukan hanya dari masyarakat Indonesia timur. Rata-rata mereka berpindah ke tanah Papua karena program transmigrasi pemerintah.

Selain itu, kondisi Provinsi Papua yang sedang dalam pergolakan gerakan separatis menjadikan bumi cenderawasih ini daerah konflik dan dijaga oleh banyak tentara militer Indonesia. Hal itu membuatnya cukup terkejut tatkala pertama kali menginjakkan kaki di kota Jayapura. Ia pun merasa bersyukur bisa menjalankan tugasnya di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jayapura hingga selesai dengan baik, dan kembali ke Jakarta.

Pengabdian dalam keberagaman

Penugasan pertama di Papua membuka rasa nasionalisme Wawan. Menurutnya, Papua merupakan simbol kebhinekaan karena ia dapat menemui dan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai suku bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ia juga banyak belajar berbagai budaya di Papua, termasuk bagaimana cara berinteraksi dengan rekan kerja dari berbagai latar belakang budaya.

Terkait dengan pengalaman di bidang perbendaharaan dan kas negara, Wawan merasa bersyukur bisa ikut membantu institusinya dalam menyelesaikan kebijakan terkait dengan program pengalihan terakhir pengelolaan pensiun di wilayah Papua. Awalnya program pensiun ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, namun kemudian beralih ke PT. Taspem. Penjelasan terkait proses peralihan tersebut tidak mudah dilakukan kepada masyarakat dan pensiunan/veteran di Papua yang

Foto
Anas Nur
Huda

memiliki budaya sangat berbeda. Dari hal tersebut, ia belajar bagaimana melakukan manajemen relasi yang baik dan juga komunikasi apabila terjadi keterlambatan atau kesalahan pembayaran pensiun.

Melayani

Hampir lima tahun mengabdikan di tanah Papua, ia pun melanjutkan pendidikan di Jakarta. Setelah lulus, ia dipindahtugaskan ke kantor pusat DJA di Jakarta. Di kantor pusat ini, ia belajar untuk melaksanakan berbagai macam penugasan yang berbeda. Dengan begitu, ia dapat mengambil berbagai pengalaman berbeda yang dapat dimanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja kantor. Pengalamannya pun cukup banyak dalam mengemban berbagai penugasan. Ia sempat menjadi Kepala Subdirektorat Perdagangan dan Ekonomi Internasional pada tahun 2008, Kepala Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran di tahun yang sama, lalu menjadi Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial pada tahun 2011, sebelum akhirnya menjabat Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN di tahun 2012 hingga sekarang.

Sebagai seorang pemimpin, Wawan selalu mendorong agar para pegawainya memberikan pelayanan yang terbaik. Ia juga menekankan agar dalam melayani selalu berorientasi pada pola pikir yang memudahkan para *stakeholders*. Karena pada dasarnya, dengan membuat mudah urusan orang lain, maka kemudahan yang lain akan kembali kepada diri kita. Namun demikian, ia selalu mengingatkan pegawainya agar tidak berbangga diri. Tujuannya agar mereka tidak cepat puas, selalu melakukan inovasi, dan perbaikan. Yang tak kalah penting, ia juga menerapkan pola disiplin waktu kepada pegawainya. Hal tersebut penting karena banyak pekerjaan yang memiliki tenggat waktu dalam penyelesaiannya. Terakhir, ia juga menjunjung tinggi nilai

keadilan (*fairness*) dalam bekerja. Sikap tersebut akan membuat suasana kerja menjadi lebih kondusif karena pada setiap diri pegawai akan tertanam nilai terkait *reward* dan *punishment* yang akan ia terima.

Transparansi melalui teknologi

Wawan terinspirasi akan perlunya penyederhanaan konsep komunikasi dari dokumen nota keuangan yang berisi banyak angka dan bahasa teknis keuangan negara. Ia juga berkeinginan untuk membantu masyarakat dalam memahami APBN secara transparan dan akuntabel, sehingga mereka sadar untuk patuh membayar pajaknya. Untuk itu, ia mencoba melakukan penelitian dan perbandingan terkait hal tersebut pada beberapa negara lainnya. Ia melihat bahwa beberapa negara maju lainnya memiliki laporan khusus yang berisi rangkuman program kebijakan penting pemerintah dalam bentuk *citizen budget*. Hal itu menginspirasi untuk menginisiasi pembuatan Buku Informasi APBN dan advertorial APBN yang lebih ringan namun berbobot kepada masyarakat.

Di sisi lain, Wawan juga tersadar bahwa pelayanan permintaan data APBN semakin lama semakin bertambah banyak, baik yang berasal dari pelajar, mahasiswa, peneliti, akademisi, maupun dari lembaga swadaya masyarakat/*nongovernment organization* yang berasal dari domestik maupun luar negeri. Secara internasional, transparansi anggaran sudah menjadi kebutuhan dan standar. Menurutnya, transparansi, dalam undang-undang keuangan negara, juga menjadi salah satu pilar utama. Untuk itu, ia kembali ditugaskan untuk belajar terkait transparansi anggaran yang berbasis internet.

Lebih lanjut, Wawan menceritakan perjalanan transparansi APBN yang sebenarnya telah dimulai tahun 2012. Pada saat itu, petikan daftar isian

pelaksanaan anggaran (DIPA) diunggah melalui *website* DJA. Namun, saat itu bentuknya masih dalam format pdf, sehingga masyarakat membutuhkan usaha khusus apabila ingin melakukan pengolahan data. Di sisi lain, era digital mendorong kebutuhan penyajian data yang mudah diakses semakin besar. Ia pun akhirnya menginisiasi untuk membuat portal khusus yang menyajikan *data set* dari APBN. Portal yang diakses di www.data-apbn.kemenkeu.go.id tersebut diresmikan pada tahun 2016. Selain memudahkan masyarakat untuk mengakses data APBN, ia berharap ke depannya portal data APBN tidak hanya sekedar menyajikan *data set*, tetapi juga dapat memberikan analisis terhadap *data set* tersebut, sehingga masyarakat dapat lebih mudah paham.

Risiko berteknologi

Memberikan pelayanan melalui teknologi bukan tanpa risiko. Wawan harus melakukan mitigasi risiko agar database dan server portal data tidak dapat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal itu sangat penting terkait dengan keamanan dan akuntabilitas data keuangan negara. Untuk itu, ia bekerja sama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) untuk menjamin keamanan dari server dan database portal data.

Risiko lain yang dihadapinya adalah adanya penyalahgunaan data untuk hal yang di luar tujuan seharusnya. Terkait hal tersebut, ia memberikan *disclaimer* bahwa Kementerian Keuangan hanya bertanggung jawab terhadap data awal yang dikeluarkan melalui portal data. Penggunaan data untuk tujuan lain akan menjadi tanggung jawab dari pengguna data. “Jadi sekarang yang kita *protect* adalah jangan sampai data yang ada di server kita itu dimasuki dan diubah oleh orang yang tidak berwenang. Tetapi

Wawan bersama keluarga

Foto Dok. Pribadi



kalau data sudah dipegang oleh siapa saja, ya sudah dia yang akan bertanggung jawab”, jelasnya.

Pengabdian sang ayah

Ayah Wawan, Kastari, merupakan sosok Camat teladan. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di level kecamatan, ayahnya harus rela membuka pintu rumahnya 24 jam sehari. Banyak warga yang segera membutuhkan bantuannya di luar jam kerja normalnya. Selain itu, ia juga belajar dari ayahnya terkait nilai pengabdian dan pelayanan. Sebagai abdi negara, ayahnya tidak boleh menolak permohonan bantuan dari warganya. Ayahnya juga harus siap mengabdikan di mana saja, termasuk dipindahtugaskan secara rutin ke wilayah lain.

Sementara itu, Kisnari, ibunya juga merupakan sosok orang tua yang penuh tanggung jawab. Pernah suatu ketika saat bulan puasa, ibunya terlupa membangunkan anak-anaknya hingga lewat jam sahur. Meski begitu, ia merasa bertanggung jawab apabila anak-anaknya sampai tidak makan karena kesalahannya. Ibunya pun menutup semua pintu dan jendela agar anak-anaknya mau makan sahur. Tidak hanya itu, ayah dan ibunya juga merupakan sosok yang sangat dihormati dan dipatuhi oleh anak-anaknya. Berkat restu orang tuanya, Wawan dapat menempuh sekolah tanpa biaya alias beasiswa mulai dari pendidikan

awal di sekolah kedinasan STAN, hingga menyelesaikan jenjang strata duanya di University of Birmingham di Inggris.

Keluarga dan perubahan zaman Suami dari Farichah dan ayah dari tiga orang anak, Humam Ahwazi, Rizky Amanatama, dan Shalahuddin Ma’luf tersebut menyadari bahwa zaman telah jauh berubah saat ini. Dengan teknologi, perkembangan informasi dan inovasi menjadi jauh lebih cepat dan beragam. Ia pun tak bisa menyamakan pola pendidikan anak ketika masih kecil dengan kondisi saat ini. Namun demikian, keterbukaan pikiran tersebut justru memberikan keleluasaan baginya dalam mengembangkan kreativitas dan pilihan berkarir anak-anaknya. Meski anak pertama mengambil jurusan yang serumpun seperti ayahnya, yakni akuntansi, terbukti anak keduanya mengambil program *studi game development* sebagai pilihan jurusan pendidikannya.

Bagi Wawan, yang paling penting adalah niat untuk mau belajar dan berusaha. Hal itu dikarenakan akan lebih sulit mengubah niat untuk belajar daripada mengubah hasil dari belajar. Di sisi lain, ia juga membiasakan untuk tidak memberikan banyak kemudahan kepada anak-anaknya. Alasannya adalah untuk mendidik anak-anaknya agar lebih menghargai usaha dan mau belajar dari pengalaman.

Harapan

Menurut Wawan, penyusunan APBN memegang peranan kunci dalam keberhasilan program kebijakan pemerintah. Untuk itu, ia berharap ke depannya masyarakat semakin mengetahui terkait proses penyusunan tersebut, sehingga akan semakin meningkatkan kesadarannya dalam membayar pajak dan ikut serta untuk mengawasi penggunaannya. Hal itu penting mengingat masih banyaknya masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap penerimaan perpajakan. “Suatu saat saya pergi ke suatu SMA, dan ditanya ‘Pak buat apa kita bayar pajak? Nanti ujung-ujungnya dibawa sama Gayus’. Peran kita menjadi penting untuk menjelaskan bahwa pajak itu untuk apa sebenarnya dan pentingnya APBN untuk kehidupan bernegara dan pembangunan bangsa. Tujuannya agar masyarakat mulai dari tingkat SMA dan selanjutnya, sadar bahwa negara ini sangat mengandalkan penerimaan pajak”, jelasnya.

Ia berharap bahwa dengan adanya portal data APBN tersebut akan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang akuntabel dan tepercaya. Selanjutnya, harapannya adalah masyarakat dapat memahami peran penting dari pendapatan dan belanja negara yang terangkum dalam APBN. Ia setuju untuk memperbanyak kegiatan edukasi dan sosialisasi APBN kepada masyarakat, seperti kegiatan DJA Menyapa untuk siswa SMA dan sederajat, kegiatan 'Budget Goes to Campus'. Untuk dirinya sendiri, ia merasa masih membutuhkan banyak tantangan dalam bekerja. Hal itu penting untuk memotivasi dirinya agar selalu dapat berinovasi dan bekerja lebih baik lagi.

Teks Abdul Aziz

Potensi Likuiditas Domestik Pasca Perbaikan Ekonomi Amerika Serikat



Kuncinya adalah menjaga stabilitas serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Foto
Anas Nur Huda

Pada Juni 2017 untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir, suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) yaitu *Fed Fund Rate* (FFR) dinaikkan selama dua kali atau sebesar 50 *basis points*¹ dalam setahun. Hal ini mengindikasikan perbaikan ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan. Meski merepresentasikan perkembangan positif, kenaikan FFR yang lebih cepat perlu diantisipasi karena menimbulkan risiko pada pasar keuangan domestik.

Sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar, kebijakan ekonomi Pemerintah AS terutama terkait kebijakan moneter sangat berpengaruh terhadap negara lainnya. Pengaruh ini sangat besar karena dapat mempengaruhi likuiditas di pasar keuangan secara langsung. Emerging Market Economies (EME) adalah salah satu kelompok negara yang pasar keuangannya sangat dipengaruhi perkembangan kebijakan moneter AS.

Pada saat AS mulai menerapkan *Zero Interest Rate Policy* (ZIRP) dan program pembelian aset (*quantitative easing*) di tahun 2009, harga aset keuangan di AS terutama yang berjangka pendek semakin murah. Hal ini tercermin dalam peningkatan suku bunga jangka pendek global *London Interbank Overnight Rate* (LIBOR) yang sebelumnya stabil berada di level sangat rendah. Dengan kondisi tersebut, investor di pasar keuangan juga dapat mengambil keuntungan melalui selisih antara tingkat bunga di AS dengan di negara lain seperti negara EME yang menawarkan tingkat bunga investasi tinggi.

Akibatnya, sejak tahun 2009, terdapat aliran dana asing masuk yang sangat besar ke pasar keuangan EME, termasuk Indonesia. Namun pada saat yang sama, sejak periode ini, pasar keuangan domestik sangat rentan terhadap pasar keuangan

global yang dipengaruhi oleh posisi kebijakan moneter AS. Saat FFR dinaikkan beberapa kali mulai akhir tahun 2015, suku bunga jangka pendek global merespons dengan cepat. LIBOR meningkat hampir sebesar total kenaikan FFR selama periode normalisasi, yaitu 100 *basis points*.

Selain suku bunga, nilai tukar di kawasan juga sedikit mengalami tekanan seiring turunnya performa transaksi modal dan finansial. Penurunan performa tersebut tercermin dari keluarnya arus modal asing dari EME. Rasio arus modal asing terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke EME secara total bernilai negatif yang berarti keluarnya dana asing sejak kuartal keempat 2014 yang dipicu utamanya oleh arus portofolio dan investasi lainnya. Periode *outflow* tersebut merupakan periode yang terpanjang sepanjang sejarah.

Faktor-faktor yang menyebabkan keluarnya dana asing tersebut adalah menurunnya perbedaan suku bunga pasar keuangan (*interest rate differential*) antara Negara EME dan AS seiring kenaikan FFR. Selain itu, perbedaan pertumbuhan ekonomi antar EME dan AS (*real economic growth differential*) juga mengecil, sehingga memicu keluarnya dana.

Sejak 2016, dampak kenaikan FFR mulai mengalami moderasi. Moderasi berlanjut hingga Juni 2017. Dari segi suku bunga, meskipun menjadikannya kenaikan tercepat dalam beberapa tahun, kenaikan FFR sebesar 25 *basis points* di bulan Juni 2017 tidak menimbulkan dampak signifikan pada pasar keuangan domestik.

Pasar keuangan domestik justru merespons rilis dari *Federal Open Market Committee* (FOMC) *minutes* yang memberikan sinyal adanya kemungkinan *the Fed* untuk mengurangi neracanya merespons inflasi yang sudah mendekati target pada dua minggu berikutnya. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 12 *basis points* menuju 5,08 persen pada lelang terakhir, setelah sebelumnya stabil di bawah 5 persen. Selain itu, suku bunga SUN 10 tahun juga naik kembali ke level di atas 7 persen setelah di bulan Juni 2017 stabil di bawah 6 persen. Kenaikan kedua indikator ini memberi sinyal diperlukannya kehati-hatian ke depan.

Dari segi nilai tukar, dampak kenaikan FFR juga tidak signifikan bagi Indonesia. Berbeda dengan EME, selama periode normalisasi, Indonesia memiliki arus modal asing yang tetap positif meskipun menurun. Sebelum normalisasi, terdapat hingga Rp180 triliun aliran dana asing ke portofolio saham dan SUN per tahun. Sedangkan setelah normalisasi, aliran dana asing per tahun menurun sekitar 30 persen.



Komentar Pakar



Handy Yuniarto,
Head of Fixed Income
Research, Mandiri
Sekuritas

Secara teori, penurunan neraca *the Fed* akan berdampak pada pengurangan likuiditas valuta asing secara global. Besaran efeknya tentu sangat bergantung pada seberapa besar obligasi pemerintah AS atau Mortgage-Backed Securities (MBS) asset yang nanti akan dilepas oleh *the Fed*. Dalam pertemuan *the Fed* yang terakhir, masih belum diketahui kapan ini mulai dilakukan. Namun, dinyatakan bahwa untuk tahap awal, *the Fed* menetapkan batas atas obligasi pemerintah AS yang akan dilepas sebesar USD6miliar per bulan selama tiga bulan pertama. Dilanjutkan dengan penambahan USD6 miliar lagi per bulan selama tiga bulan berikutnya, hingga mencapai USD30miliar per bulan. Proses pemangkasan neraca itu akan berlanjut hingga neraca akhir *the Fed* mencapai level USD2-2,5 triliun atau sekitar 12 persen dari PDB.

Berdasarkan perhitungan dari Institute International Finance (IIF), kumulatif penurunan neraca *the Fed* sebesar USD65 miliar berpotensi mengurangi arus modal asing di negara-negara berkembang sebesar USD6,8 miliar. Sementara itu, menurut perhitungan Dana Moneter Internasional dampak pengurangan neraca *the Fed* sebesar USD1,5 triliun terhadap kenaikan tingkat bunga obligasi Pemerintah AS diperkirakan hanya sebesar 42 basis points. Dengan demikian, rata-rata kenaikan tingkat bunga hanya 9 basis points per tahunnya. Ekspektasi kenaikan tingkat bunga yang relatif rendah juga didukung oleh ekspektasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Amerika yang diperkirakan masih rendah tahun ini. Jika kondisinya berbalik, bisa jadi kenaikan tingkat bunga obligasi pemerintah AS lebih tinggi lagi.

Teks Adelia Pratiwi

Positifnya arus modal asing mencerminkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia relatif baik. Hal ini tercermin dari tingkat inflasi yang terjaga, indikator daya saing Rupiah riil (*real effective exchange rate*) yang terapresiasi, peringkat kredit Indonesia yang ditingkatkan oleh lembaga pemeringkat kredit dunia Standard & Poor's, serta suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang dipertahankan pada level 4,75 persen di tengah kenaikan FFR.

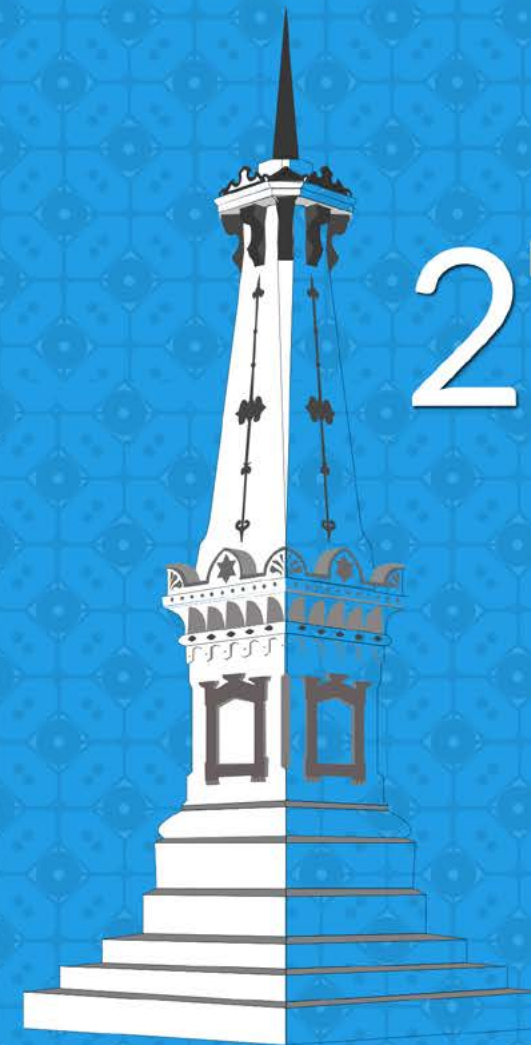
Penurunan suku bunga acuan BI turut menurunkan suku bunga perbankan, termasuk suku bunga kredit. Meskipun secara total penurunan suku bunga kredit belum menyusul penurunan suku bunga deposito sebesar 169 *basis points* selama dua tahun terakhir, rata-rata penurunan suku bunga kredit adalah sebesar 90 *basis points*. Program Amnesti Pajak turut berandil besar dalam peningkatan likuiditas perbankan tahun 2017.

Kewaspadaan dan Antisipasi tetap Dibutuhkan

Meskipun indikator perekonomian secara umum masih baik, pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari kenaikan FFR lanjutan di tahun 2017. Kenaikan FFR diperkirakan akan terjadi kembali di tahun 2017 sebanyak satu kali. Berita kenaikan FFR lebih mengundang perhatian dibandingkan dengan program pengurangan asetnya. Sebab menurut sebagian analis pasar, program pengurangan neraca *The Fed* tidak akan bersifat masif karena berisiko menimbulkan disinflasi di AS.

Merespon hal tersebut, terjeganya kredibilitas pengelolaan fiskal, terutama utang, perlu terus menjadi fokus utama pemerintah. Saat ini, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di bawah 30 persen dan defisit APBN pada kisaran 2,5 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya. Meski demikian, kredibilitas pengelolaan utang tetap perlu dijaga. Salah satunya agar defisit tidak melebar dan utang tidak meningkat secara tidak terkendali di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tinggi. Serangkaian upaya reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan perpajakan juga perlu terus dilaksanakan.

Selain itu, peningkatan efektivitas dan kesinambungan kerja sama dengan otoritas lainnya seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menurunkan biaya dana juga merupakan faktor krusial dalam mengantisipasi dinamika pasar keuangan global. Tujuan ini dapat dicapai melalui pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*) dan perluasan akses terhadap jasa keuangan (*financial inclusion*).



2nd AIFC

Annual Islamic Finance Conference

"The Role of Islamic Finance
in Eradicating Poverty and
Income Inequality"

Yogyakarta, Indonesia | August 23-24, 2017

Supported By



Menjaga Momentum Pertumbuhan Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan

Teks Mahpud Sujai
Peneliti Madya PKPPIM, Badan Kebijakan Fiskal*)

Pertumbuhan berkelanjutan telah menjadi perhatian berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang. Sejumlah negara saling mendukung dan melakukan *benchmark* terhadap berbagai program yang telah berhasil diterapkan di negara-negara lain. Sebagai contoh, pascaprogram amnesti pajak di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang berhasil menarik dana sekitar Rp150 triliun, Presiden Trump juga berencana menjalankan program diskon pajak bagi pengusaha yang membawa pulang kembali uangnya ke dalam negeri Amerika Serikat.

Keberhasilan Indonesia dalam melakukan *tax amnesty* dan melakukan upaya-upaya dalam menjaga target penerimaan pajak sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga agar APBN lebih kredibel. Penerimaan yang terjaga, didukung oleh belanja yang efektif dan efisien, serta defisit yang aman merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar momentum pertumbuhan berkelanjutan terjaga.

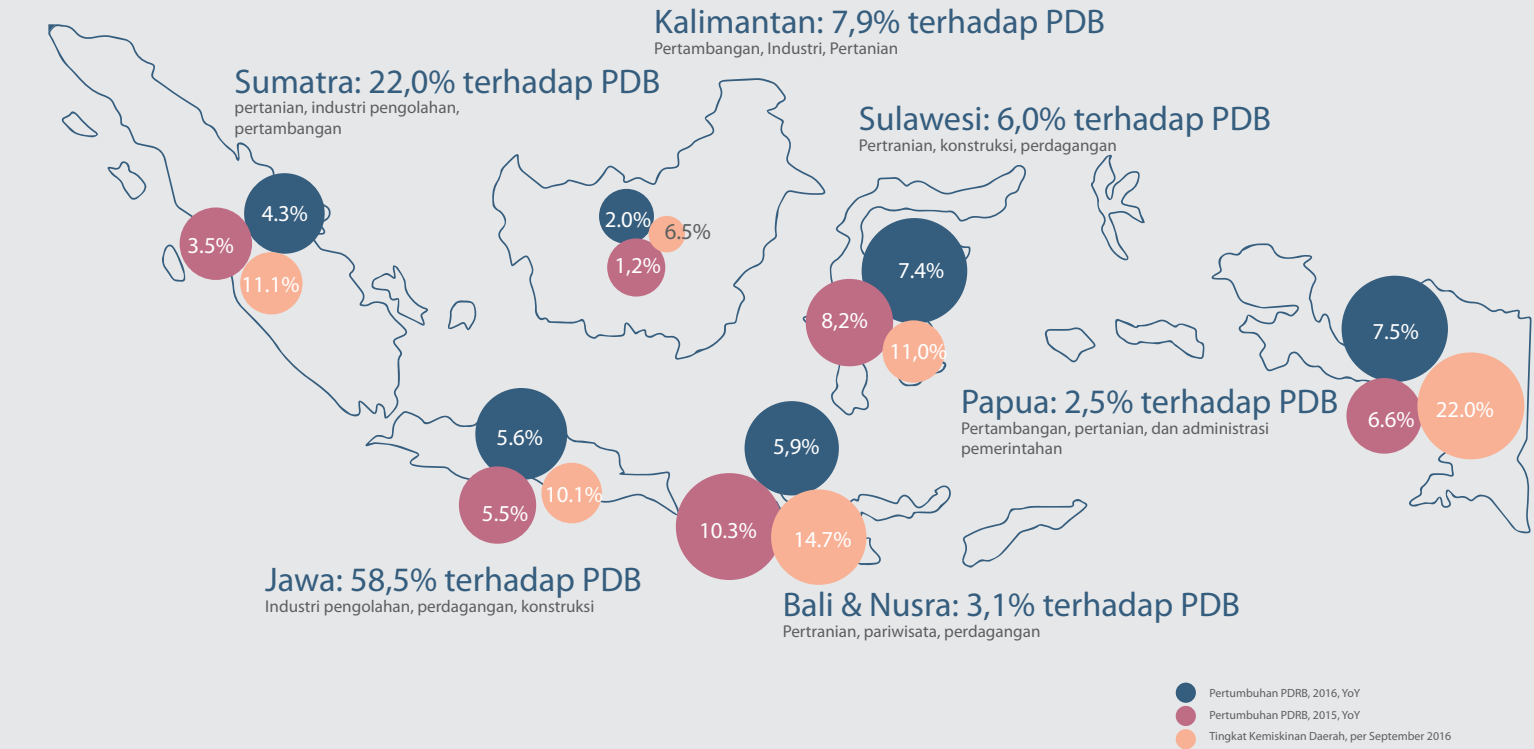
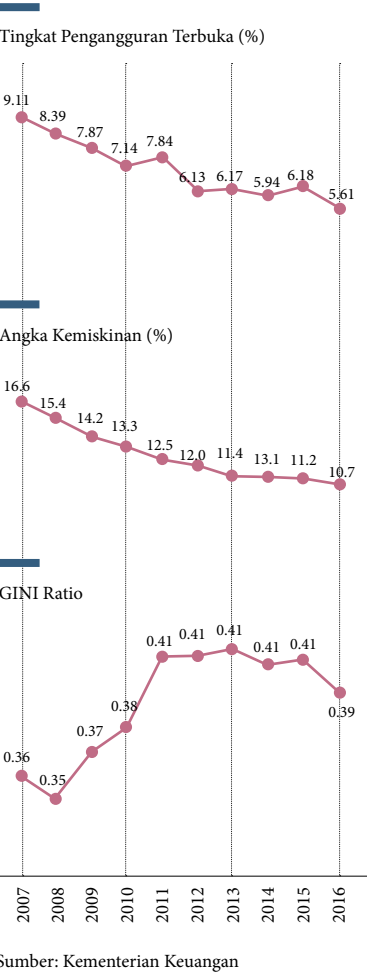
Risiko Global

Berbicara mengenai risiko global, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang

terjadi di Tiongkok dan beberapa negara lain, terutama mitra dagang Indonesia, harus terus diwaspadai. Indonesia harus mengambil langkah-langkah penting dalam upaya memitigasi risiko yang terus terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain tetap menjaga neraca perdagangan agar terus positif.

Indonesia dapat melakukan mitigasi dengan membukukan surplus neraca perdagangan sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan positif ekspor dengan rata-rata 15 persen selama kuartal pertama 2017. Prestasi ini merupakan buah dari kedisiplinan dalam meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor. Kita disiplin agar pengeluaran tidak lebih besar pasak daripada tiang. Hal ini diperkuat dengan kondisi bahwa pada 2017 hingga 2018 diperkirakan harga komoditas akan semakin membaik.

Namun dilihat dari sisi investasi, sejumlah perusahaan, terutama perusahaan domestik, masih berperilaku layaknya rumah tangga. Mereka memiliki prioritas untuk menata utang, sebelum melakukan investasi. Kondisi ini menyebabkan posisi investasi domestik masih belum meningkat secara signifikan. Pada saat yang sama, investasi asing



juga belum meningkat secara signifikan dikarenakan kondisi perekonomian 2017 dan proyeksi 2018 belum terlalu baik. Meskipun ada titik terang perbaikan dalam kondisi perekonomian Amerika Serikat.

Momentum Pertumbuhan

Meskipun kondisi perekonomian global belum terlalu menggembirakan, namun pemerintah masih tetap menjaga tingkat pertumbuhan yang stabil. Pertumbuhan ekonomi pada 2017 diproyeksikan mencapai 5,2 persen atau lebih baik dibanding 2016 lalu yang hanya tumbuh sekitar 5,0 persen. Pertumbuhan tersebut tentu akan mendorong tingkat kemiskinan ke level yang lebih rendah.

Indonesia telah berhasil menurunkan kemiskinan. Meskipun dalam beberapa

tahun terakhir mengalami stagnan, saat ini, penurunan kemiskinan menunjukkan tren peningkatan. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini di kisaran 11 persen. Dalam waktu dua tahun mendatang, diharapkan dapat turun ke tingkat *single digit* dibawah 10 persen. Sementara itu, terkait tingkat pengangguran, diperkirakan mengalami penurunan dari 6,2 persen pada 2015 menjadi 5,6 persen pada 2016.

Pertumbuhan yang terus terjaga hingga saat ini ternyata belum mampu menciptakan pembangunan yang lebih merata. Hingga saat ini, pemerataan perekonomian di Indonesia masih belum ideal. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya nilai *gini ratio* di Indonesia. Meskipun mengalami penurunan dari 0,414 pada 2014 menjadi 0,402 pada 2015

dan 0,394 pada 2016, nilai gini ratio masih tetap menunjukkan tingginya ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan. Langkah-langkah tersebut antara lain pemerintah terus memberikan bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat miskin dan golongan yang berhak. Sebagai contoh subsidi listrik dan BBM yang lebih terarah, subsidi pupuk bagi petani, dan berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai bantuan sosial lainnya. Selain itu, belanja pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat terutama untuk golongan yang membutuhkan dalam bentuk beasiswa bagi siswa miskin dan iuran BPJS bagi masyarakat penerima bantuan iuran.

Dalam rangka mengurangi kesenjangan yang cukup lebar, baik antargolongan pendapatan maupun antarwilayah, pemerintah perlu menjaga momentum pertumbuhan. Caranya dengan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam hal mengatasi ketimpangan antarwilayah, Pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur terutama bagi wilayah-wilayah di luar Jawa dan bagian timur Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dan menciptakan pertumbuhan pembangunan yang lebih cepat di wilayah-wilayah tertinggal. Dengan memicu pertumbuhan di wilayah tersebut, diharapkan kesenjangan antarwilayah akan terus berkurang.

Langkah-langkah yang perlu diambil

Dalam rangka mengurangi kesenjangan yang cukup lebar, baik antargolongan pendapatan maupun antarwilayah, pemerintah perlu menjaga momentum pertumbuhan. Caranya dengan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Menjaga momentum pertumbuhan inklusif dapat dilakukan dengan berbagai langkah.

Pertama, reformasi fiskal. Pemerintah harus terus menciptakan kondisi fiskal yang kondusif untuk menjaga momentum pertumbuhan. Kondisi fiskal yang kondusif tercipta dengan menjaga stabilitas makroekonomi, menjaga penerimaan negara agar sesuai target, melakukan efisiensi belanja negara dan menjaga defisit agar lebih terkelola dengan baik. Hal ini dilakukan untuk membuat dampak *multiplier* jika terjadi penurunan penerimaan dari target dan belanja yang lebih tinggi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas belanja melalui peningkatan anggaran belanja infrastruktur agar dapat mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, reformasi iklim usaha. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan investasi swasta baik domestik maupun asing untuk mendorong pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan mendukung pemenuhan defisit anggaran belanja infrastruktur. Iklim usaha harus terus diperbaiki dengan cara mempermudah dan mempercepat perizinan bagi investor, menjaga ketersediaan energi, memperbaiki kualitas infrastruktur, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Ketiga, menurunkan biaya logistik. Biaya logistik dan *inventory cost* di Indonesia cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Malaysia. *Logistic cost* di Indonesia sebesar 23 persen dari biaya produksi, sedangkan Thailand hanya sebesar 15 persen, dan Malaysia sebesar 13 persen. Sementara itu untuk *inventory cost*, Indonesia mencapai 29 persen dari total biaya logistik, sedangkan Thailand hanya 16 persen dan Malaysia 17 persen. Penurunan biaya logistik tersebut mutlak dilakukan agar Indonesia dapat bersaing dalam memperluas pasar ekspor dan

mengurangi harga produk domestik. Penurunan biaya logistik dapat dicapai dengan cara memperbaiki infrastuktur transportasi dan konektivitas, seperti jalan, pelabuhan, maupun infrastruktur yang lain.

Keempat, meningkatkan investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Investasi dalam peningkatan SDM melalui pendidikan dan peningkatan keahlian. Alokasi anggaran pendidikan yang sudah cukup tinggi harus dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, baik sarana maupun prasarana pendidikan. Selain itu, keahlian masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja yang terampil dan memiliki keahlian. Peningkatan keahlian masyarakat tersebut sangat penting terutama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian melalui sektor jasa seperti pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua sektor tersebut perlu diberikan porsi lebih karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menyumbang pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat.

Dengan berbagai langkah kebijakan tersebut, diharapkan pemerintah bisa menjaga momentum pertumbuhan perekonomian yang inklusif. Tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga dapat mengurangi kesenjangan, baik antargolongan pendapatan maupun antarwilayah. Pembangunan yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan kita bersama yang harus diupayakan. Dengan demikian dapat tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Panas Bumi

Energi Masa Depan

Panas Bumi atau *Geothermal* merupakan energi bersih ramah lingkungan yang tidak menghasilkan emisi/ *zero carbon emission*.

Dalam jangka panjang biaya pembangkitan listrik dari energi panas bumi lebih rendah jika dibandingkan dengan energi konvensional seperti batubara.



Lokasi: PLTP Dieng, Jawa Tengah

Potensi Panas Bumi di Indonesia

Indonesia memiliki potensi panas bumi yang mampu menghasilkan listrik 29.000 MW atau 40 persen potensi panas bumi dunia. Pemanfaatan panas bumi di Indonesia baru mencapai 5,6 persen dari potensi yang ada, atau sekitar 1.600 MW. Risiko eksplorasi merupakan salah satu penyebab lambatnya pengembangan Panas Bumi di Indonesia.

Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi

Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) merupakan Fasilitas Fiskal yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk pembiayaan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka mengakselerasi pengembangan panas bumi di Indonesia untuk mencapai target 7.200 MW pada tahun 2025. Pengelolaan Dana PISP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pencapaian Istimewa Sang Doktor Muda



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpd@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Shofarul Wustoni adalah salah satu penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bertabur prestasi. Dengan beasiswa LPDP, anak muda kelahiran Bangkalan, Jawa Timur, 26 September 1989 itu berhasil menamatkan pendidikan doktor di Waseda University, Tokyo pada 2016. Yang lebih istimewa, program pendidikan S1 dan S2 Toni–sapaan akrab Shofarul Wustoni–juga diselesaikan dengan beasiswa.

Toni percaya ada banyak nilai dan pengalaman yang bisa dipelajari dalam proses interaksi di negara orang. Oleh karena itu, dia memutuskan pergi ke Jepang untuk melanjutkan studi. Bidang ilmu nanoteknologi yang ditekuni Toni memang berkembang pesat di sana. Kelengkapan fasilitas riset dan teknologi juga sangat mendukung. “Di samping itu, ada nilai-nilai positif dari penduduk Jepang yang bisa diadaptasi selama hidup di sana,” kata dia kepada Media Keuangan.

Meskipun sang ayah sudah menjadi pensiunan PNS sejak Toni duduk di bangku SMA, dia tak menyerah dalam menggapai pendidikan. Program S1 di Institut Teknologi Bandung dirampungkannya dengan beasiswa unggulan Dikti, sedangkan gelar master diraih Toni di Waseda University dengan pembiayaan penuh dari pemerintah Jepang melalui Beasiswa Monbukagakusho.

Nanoteknologi dan Biosensor

Sejak menyelesaikan program master pada 2013, Toni semakin tertarik menekuni ilmu *nanoscience and nanoengineering*. “Bidang ini merupakan kombinasi beberapa disiplin ilmu, seperti material sains, kimia, fisika, dan biologi,” kata dia. Penelitian S3-nya yang terakhir terkait pengembangan biosensor divais berbasis transistor. Penelitian itu mengambil fokus pada modifikasi dan transformasi transistor divais yang sudah dikembangkan sebelumnya di laboratorium. Hasil modifikasinya berbentuk biosensor yang bisa mendeteksi beberapa target biomolekul seperti protein terkait penyakit prion dan protein yang menjadi biomarker untuk penyakit kanker.

Mimpi terbesar Toni lewat studi yang dilakukannya dan rencana riset jangka panjangnya adalah berkontribusi menciptakan teknologi atau divais yang sederhana, murah, dan aplikatif untuk mendeteksi dan mendiagnosis penyakit. “Harapannya divais ini bisa disebarluaskan di seluruh pelosok nusantara, khususnya daerah-daerah yang masih minim fasilitas kesehatan dan sulit menjangkau perkotaan,” kata Toni.

Tantangan

Adaptasi lingkungan dan budaya riset menjadi salah satu tantangan awal yang dihadapi Toni saat memulai studi

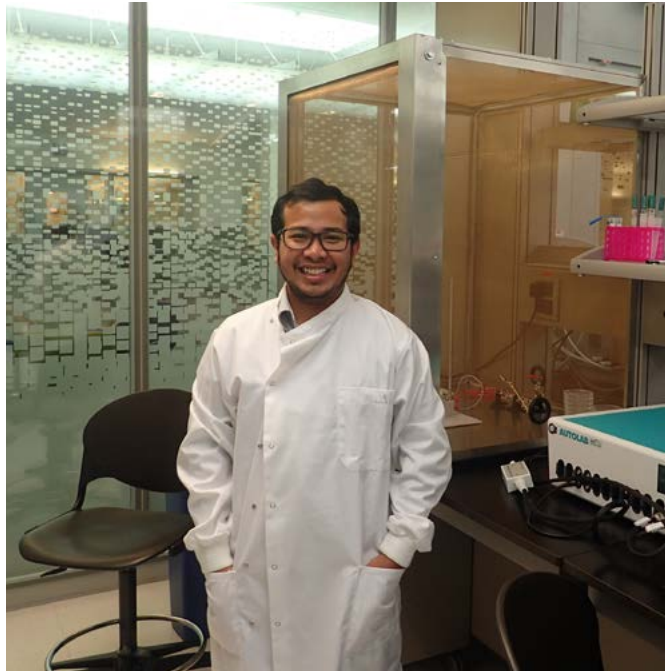
di Negeri Sakura. Tantangan itu tak sulit ditangani karena keramahan penduduk dan keteraturan hidup di sana. “Dalam kehidupan sehari-hari, sistem yang jelas, tertata, dan praktis merupakan ciri khas dan hal paling berkesan selama di Jepang,” kata Toni. Komunitas pelajar Indonesia di Jepang yang penuh kebersamaan dan saling membantu juga membuat tantangan Bahasa Jepang dan budaya bisa diatasi.

Dari segi pembelajaran di dalam kelas, Toni menilai kualitas mahasiswa Indonesia tidak jauh berbeda dengan mahasiswa negara lain. Bahkan, bisa lebih unggul dalam aspek tertentu. “Saya mengenal mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Jepang dengan banyak prestasi dibandingkan pelajar dari negara lain,” kata Toni. Ia berharap ke depan bisa menjadi bagian dari generasi Indonesia yang ikut berkolaborasi mensinergikan seluruh potensi pemuda menjadi sebuah resultan energi dengan karya positif.

Aktivitas lain

Di samping menjalani perkuliahan, selama tinggal di Jepang Toni juga senang terlibat dalam organisasi dan kepanitian. Toni merupakan aktivis Persatuan Pelajar Indonesia (PPI). Dia sempat menjadi Ketua PPI Jepang daerah Kanto (Tokyo dan sekitarnya) pada 2013–2014.

Bukan hanya itu, Toni juga menjadi pengurus organisasi profesi dan keilmuan



Dari laboratorium, Toni menghasilkan penelitian yang menunjang studinya

Foto Dok. Pribadi

di Jepang (ISTECS), serta berpartisipasi aktif dalam beberapa kepanitiaan Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia (KMII) Jepang. “Saya juga ikut pada beberapa kegiatan untuk berbagi pengalaman studi di luar atau diskusi keilmuan via *online*,” ujarnya.

Meskipun sibuk dengan kuliah dan organisasi, Toni tetap berhasil meraih banyak prestasi. Selama belajar di Jepang, Toni sempat mempresentasikan belasan karya ilmiah di sana maupun negara-negara lain seperti Indonesia, Australia, Amerika Serikat, dan Swiss. Sejumlah prestasi juga diterimanya, antara lain penghargaan Mizuno Award for Doctoral Thesis 2016 dari Waseda University, Student Travel Grant from Sensor Division of the Electrochemical Society (ECS) untuk presentasi di konferensi tahunan ECS 2015, Travel Grant from Marubun Research Foundation pada 2015, Mizuno Fellowship 2014 and Research Grant for Young Doctoral Student 2013 dari Global Center of Excellence dari Waseda University.

Sumbangsih

Toni memiliki segudang rencana untuk berkontribusi terhadap negeri. Dia ingin bergerak dan beraktivitas di

bidang pendidikan, riset pengetahuan dan teknologi, hingga pengembangan bidang *socialtechnopreneurship*. Melalui bidang pendidikan, Toni ingin berbagi dan berusaha mendorong lebih banyak generasi muda kurang mampu atau berasal dari daerah-daerah nonperkotaan agar bisa merasakan pendidikan lanjutan.

Toni bercerita bahwa dia termasuk salah satu anak desa yang mendapatkan informasi dan memperoleh beasiswa Dikti lewat jalur Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA ke ITB. Sejak saat itu, dia mulai menemukan banyak peluang. “Meskipun saat ini perkembangan teknologi informasi maju pesat, namun persebaran informasi belum benar-benar merata ke seluruh daerah” ujar Toni.

Aktivitas lain yang sedang direncanakan adalah mencari kegiatan yang bisa mempertemukan anak-anak muda daerah berpotensi dengan peluang-peluang beasiswa dan pendanaan, sehingga mereka bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. “Saya mengalami sendiri bagaimana kawan-kawan karib di SD atau SMP yang belum bisa merasakan atau harus terputus jenjang pendidikannya karena masalah ekonomi, sedangkan mereka memiliki potensi akademik yang begitu besar.”

Untuk turut berkontribusi pada bidang riset iptek dan *social technopreneurship*, Toni mulai mempelajari, membentuk tim, dan membuat rencana spesifik ide-ide berbasis iptek yang bisa aplikatif di Indonesia. Utamanya pada komoditas berbasis sumber daya alam yang ada seperti peningkatan kualitas garam, pengolahan limbah proses sampingan dari tambang batu kapur, limbah batu bata, limbah karet dan tebu, dan sejenisnya dengan pendekatan kimia maupun material sains. “Saya ingin riset yang dijalani bisa berujung pada *prototype* atau produk yang bisa bermanfaat langsung, termasuk membuka lapangan pekerjaan baru,” ujar Toni.

Harapan

Usai menyelesaikan penelitian S3 pada usia 26, Toni berharap dapat merasakan suasana belajar sebagai peneliti *postdoc* di beberapa institusi di negara berbeda dalam beberapa tahun ke depan, sampai dia berusia 30 tahun. “Motivasi dan harapan dari periode *postdoc* yang dijalani ini untuk mendapatkan *networking* yang lebih luas di beberapa negara, merasakan dan mempelajari kultur riset dan cara berpikir ilmiah yang berbeda, serta pengalaman hidup baru selain di Jepang,” kata Toni.

Menurut Toni, modal *networking* dengan berbagai kolega *postdoc* dari berbagai negara dan kesempatan belajar riset ke profesor berbeda akan sangat bermanfaat untuk rencana profesi dan kontribusinya ke depan. Selama periode studi S3 dan *postdoc*, Toni berharap dapat tuntas dengan dirinya sendiri. “Dengan demikian, saat pulang nanti semoga bisa sadar diri dan tidak mengeluh, serta memiliki fokus bergerak dengan kondisi apapun dalam berkontribusi untuk tanah air” ujar dia.

Teks Dwinanda Ardhi

Kiprah Wanita sebagai Menteri Keuangan Rumah Tangga

Teks Harlinda Siska Pradini, Pegawai KPP Pratama Banyuwangi

Era demokrasi telah membuka lebar jalan karier dan pendidikan bagi kaum wanita. Kini, wanita aktif berkiprah di panggung politik, menduduki jabatan penting pada perusahaan atau pemerintahan, serta terlibat dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Keseluruhan peran tersebut tentu tak dapat menggeser tugas utama seorang wanita. Setelah mengakhiri masa lajang, setiap wanita akan dihadapkan pada tanggung jawab baru untuk mengelola urusan rumah tangga, termasuk manajemen keuangan.

Aktivitas ekonomi dalam keluarga bukan berorientasi pada laba, tetapi bertujuan untuk mencapai kapasitas keuangan rumah tangga yang berkelanjutan. Piorkowsky (2000) dalam artikelnya “Household Accounting in Germany” memaparkan dua perbedaan mendasar antara entitas perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan merupakan unit produksi dengan orientasi pada perolehan laba, sedangkan rumah tangga merupakan unit konsumsi dengan tujuan peningkatan kualitas hidup.

Rumah memiliki konsep holistik. Rumah bukan sekedar bangunan fisik sebagai tempat berlindung dan beristirahat, namun juga ladang kedamaian

dan kebahagiaan bersama keluarga. Beranjak pada perspektif keuangan, Walker dan Llewellyn (2000) memaknai rumah sebagai tempat ditemukannya kinerja praktik rasional seperti akuntansi dan teridentifikasinya struktur pertanggungjawaban yang beragam. Akuntansi rumah tangga (*Household Accounting*) menjadi terminologi penerapan praktik akuntansi pada kehidupan keluarga.

Akuntansi rumah tangga

Di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, pembukuan dan akuntansi rumah tangga telah lama digunakan sebagai instrumen personal dan media manajemen keuangan, materi penelitian ilmiah, pengumpulan data statistik masyarakat, bahan pengajaran dan konsultasi penganggaran bagi institusi pemberi pinjaman dan badan konsumen (Piorkowsky, 2000).

Akuntansi rumah tangga tidak hanya mencakup isu ekonomi domestik, keuangan dan manajemen, tetapi juga melibatkan berbagai ilmu dalam dimensi sosial (Walker dan Llewellyn, 2000). Praktik akuntansi keluarga bersinggungan dengan sisi emosional yaitu kualitas hidup, dimana terdapat dambaan untuk mengurangi

rasa ketidakamanan, rasa bersalah, serta keinginan untuk memperkuat identitas dan kemandirian (Northcott dan Doolin, 2000).

Praktik akuntansi pada rumah tangga tak dapat dipisahkan dari peran wanita sebagai menteri keuangan keluarga. Akuntansi rumah tangga mendukung wanita dalam mengelola rumah tangga secara profesional (Carnegie dan Walker, 2005). Kompetensi ini membantu wanita dalam mencegah timbulnya kondisi kebanyakan berhutang dan menciptakan kemudahan saat menghadapi kesulitan keuangan rumah tangga (Piorkowsky, 2000).

Northcott dan Doolin (2000) mengidentifikasi empat kategori dalam praktik akuntansi rumah tangga yaitu penganggaran, pencatatan, pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan jangka panjang. Penganggaran adalah teknik akuntansi yang paling umum digunakan.

Penganggaran diperlukan untuk merencanakan dan mengendalikan pengeluaran, mengidentifikasi pos pengeluaran yang berlebihan, memenuhi kebutuhan, mencegah dorongan konsumsi berlebih, menghindari jeratan utang, serta mengalokasikan tabungan dan investasi. Selain itu, penganggaran juga berfungsi untuk memastikan pendapatan jangka pendek dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran dengan tujuan jangka panjang.

Penganggaran rumah tangga akan mendorong keterampilan manajemen anggota keluarga. Penganggaran partisipatif dengan melibatkan orang tua dan anak akan mentransmisi praktik pengelolaan keuangan serta menstimulus kesadaran akan nilai uang (Walker dan Llewellyn, 2000).

Pencatatan akuntansi dalam rumah



tangga perlu mengedepankan aspek kemudahan, kebutuhan pengguna dan memperkuat manajemen internal (Piorkowsky, 2000). Penyusunan pembukuan atau pencatatan minimal dapat digunakan untuk memantau arus pendapatan dan biaya, saldo kas, asset dan kewajiban. Kemudian, catatan akuntansi tersebut didokumentasikan untuk mengantisipasi monitoring eksternal seperti bank dan audit perpajakan.

Tujuan utama penyusunan laporan keuangan adalah keakuratan dalam pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan pada rumah tangga terdiri dari pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang, tabungan, serta pemenuhan

kebutuhan primer. Kualitas keputusan yang dihasilkan ditentukan oleh kualitas informasi yang disajikan. Terakhir, pada praktik perencanaan keuangan jangka panjang perlu memperhatikan aspek peningkatan kelayakan rumah, tabungan masa depan, dan partisipasi dalam skema pensiun.

Kesimpulan

Dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola keuangan rumah tangga, wanita perlu dibekali dengan kompetensi akuntansi rumah tangga. Teori dan praktik akuntansi rumah tangga dapat ditanamkan baik melalui pendidikan formal maupun pendekatan sosial kemasyarakatan. Misalnya saja melalui pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan literasi keuangan bagi ibu rumah tangga. Manajemen keuangan rumah tangga yang baik akan mencegah timbulnya kesulitan keuangan yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan psikologis seperti stress dalam pernikahan, depresi, perasaan gagal dan tidak berdaya (Northcott dan Doolin, 2000).

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Pembekalan tentang manajemen rumah tangga seharusnya tidak hanya berkisar isu sosial psikologis namun hendaknya juga mulai menyentuh aspek keuangan. Dalam skala makro, kompetensi akuntansi rumah tangga bagi wanita dapat membantu pemerintah dalam mencegah kemiskinan, mendorong partisipasi rumah tangga pada produk investasi pemerintah, perbaikan kualitas konsumsi masyarakat dan persiapan generasi masa depan yang melek literasi keuangan.



Terkena Bencana, Tarif PBB Berkurang Hingga 100%

Riviu PMK Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Ilustrasi
Muhammad Fithrah

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan pengurangan tarif atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara lain bagi wajib pajak yang mengalami kerugian akibat bencana alam, yaitu dengan diberikan pengurangan hingga sebesar 100%. Aturan tersebut tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 20 Juni 2017.

Pengurangan hingga 100%

Pengurangan PBB dapat diberikan kepada wajib pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang memiliki hubungan dengan subjek pajak dan dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Objek pajak dimaksud adalah objek pajak sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Kondisi tertentu yang

dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PMK ini yaitu kerugian dan kesulitan likuiditas pada akhir tahun buku sebelum pengajuan permohonan pengurangan PBB untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, atau pada akhir tahun kalender sebelum pengajuan permohonan pengurangan PBB apabila wajib pajak melakukan pencatatan.

Kerugian yang dapat mengurangi kewajiban pembayaran PBB yaitu kerugian komersial yang dibuktikan dari laporan keuangan yang dilampirkan di dalam SPT Tahunan PPh atau pencatatan yang dilampirkan di dalam SPT Tahunan PPh dalam hal wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan kesulitan likuiditas merupakan

kondisi ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Hal ini terlihat dari *current ratio* (aktiva jangka pendek dibandingkan dengan utang yang masuk kategori utang lancar) yang nilainya kurang dari 1, sehingga perusahaan mengalami kesulitan likuiditas.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (b), pengurangan PBB juga dapat diberikan apabila objek pajak terkena bencana alam atau kejadian lain yang luar biasa. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor. Adapun sebab lain yang dikategorikan luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru hara, kerusakan, atau tindakan anarkis.

Besaran pengurangan tarif PBB yang diberikan pemerintah sangat beragam. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b PMK Nomor 82/PMK.03/2017. Dalam hal kondisi tertentu, yaitu apabila objek pajak memiliki hubungan dengan subjek pajak, maka Pemerintah memberikan pengurangan tarif PBB sebesar paling tinggi 75% dari PBB yang terutang. Dalam kondisi objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, Pemerintah pun dapat memberikan potongan pengurangan tarif PBB hingga 100% dari PBB yang terutang. Apabila wajib pajak terkena bencana atau sebab tertentu tersebut, jumlah PBB yang terutang untuk menjadi nilai pengurangan kepada wajib pajak adalah sebesar jumlah pokok pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), jumlah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB, atau

jumlah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PBB.

Proses Pengajuan

Mekanisme pengurangan tarif PBB bukan berdasarkan analisis atas laporan keuangan wajib pajak, tetapi berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh wajib pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan disampaikan melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib pajak dapat mengajukan keringanan pengurangan pembayaran PBB semenjak PMK ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 21 Juni 2017.

Waktu pengajuan permohonan memiliki jangka waktu yang berbeda. Permohonan pengurangan PBB yang disebabkan karena kondisi tertentu harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB, satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STP PBB yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB, atau satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan pembetulan atas SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang diterbitkan.

Adapun permohonan pengurangan PBB terhadap objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa harus memenuhi beberapa ketentuan, seperti permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dan mencabut pengajuan keberatan PBB, banding, peninjauan kembali, serta permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar, atau pengurangan/penghapusan denda administrasi PBB, dalam hal atas pengajuan atau permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan atau putusan.

Apabila dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak telah lengkap, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 9 PMK Nomor 82/PMK.03/2017, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan akan melakukan pengujian, penelitian, dan kemudian memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB. Proses pengujian, penelitian hingga pemberian keputusan permohonan tersebut harus diselesaikan paling lambat empat bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pengurangan PBB diterima. Setelah itu, Direktorat Jenderal Pajak akan memutuskan apakah dapat mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, ataukah menolak permohonan pengurangan tarif PBB dari wajib pajak.

Penutup

Pengurangan tarif PBB ini merupakan salah satu kebijakan otoritas pajak untuk memberikan insentif pajak berdasarkan prinsip keadilan ekonomi. Fungsi ini menjadikan bukti bahwa otoritas pajak tidak hanya sebagai pengumpul kas negara. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan yang terkena dampak bencana alam pada dasarnya dapat diberikan insentif pengurangan pembayaran PBB sehingga perusahaan dapat lebih efisien dan fokus dalam mengembangkan usahanya.

Berkenaan dengan telah dialihkannya fungsi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebagai pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sejak tahun 2009, dalam sosialisasi aturan ini hendaknya menegaskan bahwa objek pajak dalam aturan ini hanya terkait pajak untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya.

Teks Budi Sulistyono

Berkarya Melalui Lagu, Tulisan, dan Puisi

Melangkahlah, maju bersama kami

Deru semangat, gelorakan jiwa

Bersatulah Kementerian Keuangan

Meraih cita-cita, Itjen s'lalu ada 'tuk Indonesia.

Jingle Inspektorat Jenderal ini bergema menyemangati para pegawai di lingkungan gedung Djuanda I dan II Kementerian Keuangan, Jakarta. Simak saja liriknya yang apik, berima, dan menggambarkan semangat kerja pegawai Kementerian Keuangan. Tak banyak yang tahu, sosok di balik pencipta lirik tersebut adalah seorang mantan auditor yang sangat berjiwa sastra.

Ialah Hisyam Haikal, pria kelahiran Jakarta 20 Juni 1970 yang gemar menulis sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kala itu, Hisyam rutin mengisi buku harian dengan cerita-cerita yang ia alami sehari-hari. Kemudian ia terbersit untuk menulis cerita pendek (cerpen) dan mengirimkan ke Majalah Bobo. Betapa senang hati Hisyam saat ceritanya berhasil dimuat di majalah anak-anak kesayangannya.

Cerpen yang dikirim saat itu berjudul “Rumah Berkamar Banyak.” Cerita ini merupakan pengalaman pribadi Hisyam yang tinggal di rumah besar di bilangan Palmerah, Jakarta dengan kamar yang banyak. Rumah sederhana itu ditinggali keluarga Hisyam yang terdiri dari ayah dan ibu Hisyam bersama tujuh orang anak, enam adik dari ayah Hisyam, dan tiga keponakan Hisyam. Cukup penuh memang. Namun Hisyam menikmati kebersamaan bersama keluarga ini dan mampu menuangkannya dalam sebuah cerita menarik.

Terinspirasi Ayah

Ada sebuah cerita menarik dari masa kecil Hisyam. Saat masih di bangku SD, suatu kali Hisyam kedatangan seorang tamu ke rumah. Tamu tersebut membawa kue untuk sang ayah yang kebetulan masih bekerja. Hisyam bersama saudara-saudaranya yang berjumlah enam orang tersebut menerima kue itu dengan senang hati dan langsung dinikmati bersama-sama. Saat ayah Hisyam tiba di rumah, beliau pun marah besar mengetahui anak-anaknya memakan kue pemberian orang itu.

Ayah Hisyam memang berprofesi sebagai hakim. Tak jarang ada beberapa pihak yang gemar menghadiahi segala bentuk barang. Namun semuanya ditolak mentah-mentah. Bahkan sang ayah menolak siapapun datang ke rumah bila ingin membicarakan urusan pekerjaan. Akhirnya ayah Hisyam menyuruh anak-anaknya untuk mencari kue yang sama persis untuk dikembalikan. Ketegasan dan kejujuran sang ayah menginspirasi Hisyam beserta saudara-saudaranya untuk bertindak jujur dalam setiap kesempatan. Terlebih sejak berprofesi sebagai auditor Kementerian Keuangan, Hisyam memahami betapa ketegasan dan integritas yang dipegang ayahnya sejak dulu itu sangat berharga.

Memasuki bangku sekolah menengah pertama (SMP), Hisyam mulai membaca karya para sastrawan Indonesia. “Kalau

ke perpustakaan, saya pasti mencari buku Emha Ainun Najib,” ujar Hisyam mengenang masa remajanya. Emha Ainun Najib atau biasa disebut Cak Nun adalah budayawan, seniman, penulis, sekaligus penyair kenamaan Indonesia. Hisyam menyenangi cara Cak Nun bertutur dan menuangkan gagasannya ke dalam tulisan. “Tulisannya lincah dan liar,” tambah Hisyam yang kedua putrinya berkuliah di jurusan Sastra Indonesia Universitas Indonesia.

Keluarga Hisyam kemudian berpindah ke Tegal. Selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Tegal, Hisyam melanjutkan studi di DIII Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) jurusan Akuntansi. Pada tahun 1992, Hisyam ditugaskan di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Langkahnya sebagai seorang auditor pun dimulai sebagai Auditor Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.

Pada tahun-tahun berikutnya, ayah dari dua putri ini semakin mengembangkan diri sebagai auditor dengan spesialisasi berbagai bidang. Pada tahun 1999-2001, Hisyam bertugas sebagai Auditor Bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian, berturut-turut ia bertugas sebagai Auditor Bidang Pajak, Auditor Bidang Kekayaan Negara dan Lelang, Auditor Bidang Litbang Itjen, Auditor Bidang Bea dan Cukai.



Hisyam bercita-cita lebih produktif dalam menerbitkan buku

Foto
dok. pribadi

Menerbitkan Buku

Bagi pria penggemar tetralogi Laskar Pelangi ini, kegiatan menulis dan membaca buku bagaikan obat penghilang kejenuhan di sela-sela kesibukan di kantor. Pada tahun 2012, Hisyam menerbitkan buku berjudul “Ayahku Auditor, Ayahku Pahlawan.” Buku berisi kisah-kisah inspiratif para auditor ini dicetak sebanyak 1000 eksemplar. Hisyam merasakan kepuasan tersendiri saat tulisannya bisa memberikan pengetahuan baru mengenai suka duka seorang auditor.

Kini, pria yang berdomisili di Cibinong ini sedang proses menyusun buku kumpulan puisi yang bekerja sama dengan komunitas fotografi Inspektorat Jenderal. Beberapa puisinya ada di majalah dan media sosial bahkan acap kali diminta izin untuk dibacakan pada acara tertentu. Tak hanya di lingkungan Inspektorat Jenderal, puisi ciptaannya bahkan beberapa kali dibacakan pada peringatan hari besar di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kecintaannya terhadap dunia menulis juga ia wujudkan melalui media publikasi internal. Sejak tahun 2011 hingga

saat ini, Hisyam berkontribusi penuh terhadap penerbitan Majalah Auditoria sebagai Pemimpin Redaksi. Kiprahnya menghidupkan kembali majalah ini sudah dimulai sejak tahun 2009. Majalah Auditoria adalah majalah internal Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Mulanya, Hisyam kesulitan menemukan kontributor untuk mengisi beberapa rubrik. Kini ia terbantu dengan kebijakan bahwa seluruh pegawai diharuskan menulis demi memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hisyam tak berhenti mendorong para rekan-rekannya untuk terus menulis demi mengembangkan diri. Inspektorat Jenderal kini memiliki wadah tersendiri bagi para pegawai yang ingin mengirimkan tulisan, yaitu Majalah Auditoria, Majalah Cosmos, blog Auditora, dan website Inspektorat Jenderal. Hisyam juga menciptakan lirik lagu Sinergi untuk Negeri yang kemudian diaransemen oleh para pegawai berjiwa musisi di Inspektorat Jenderal. Lagu yang menggelarakan semangat kerja ini dipersembahkan dalam acara *Transformation Day* yang memperingati 50 Tahun Inspektorat Jenderal pada September 2016.

Hisyam berharap banyak pada kontribusi generasi muda untuk mengembangkan Majalah Auditoria dan Majalah Cosmos Inspektorat Jenderal. “Saya ingin Majalah Auditoria bisa naik level menjadi majalah resmi Asosisasi Auditor Intern Pemerintah, lebih banyak sisi ilmiah yang bisa ditonjolkan dibanding sisi populernya,” ujarnya sembari tersenyum ramah.

Teks Pradany Hayyu

Sudahkah Anda Menambah Saldo Rekening Bank Emosi?

Siapakah rekan kerja paling berkesan bagi Anda? Bagi saya, seorang sekretaris Eselon II di tempat bekerja adalah sosok yang menginspirasi. Ia bisa saja ‘hanya’ mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, seperti mengadministrasikan persuratan, mengagendakan rapat, dan sebagainya. Namun, ia memberi sentuhan ‘lebih’ pada pekerjaanya.

Setiap pagi, sekitar pukul 6, ia menuliskan seluruh jadwal rapat direktorat untuk hari itu di grup WhatsApp direktorat. Baik undangan rapat dari luar, maupun agenda rapat yang dijadwalkan salah satu sub direktorat. Mulai dari waktu, tempat, agenda rapat, hingga sub direktorat mana yang bertanggung jawab. Menariknya, ia selalu menyisipkan satu kutipan dari tokoh terkenal atau perkataan dari pegawai di direktorat kami. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, saya menunggu pesannya itu.

Tak hanya itu, ia juga menginisiasi kuis lewat grup WhatsApp. Mulai dari pertanyaan yang tampak remeh seperti “Berapakah jumlah dispenser di direktorat?” hingga yang terkait dengan

pekerjaan. Setiap pemenang kuis akan mendapatkan hadiah.

Apa yang dilakukannya mungkin tampak sederhana, tetapi tidak semua orang memiliki ide dan kemauan untuk melakukannya. Hal yang sederhana. Namun memberi makna. Melalui pesan tentang agenda rapat harian, minimal seluruh pegawai direktorat mengetahui pekerjaan apa yang dihadapi dan unit mana yang bertanggung jawab, mengingat cukup banyak pekerjaan *ad hoc*. Menghidupkan grup WhatsApp melalui kuis maupun kutipan dari perkataan pegawai, membuat hubungan antarpegawai semakin akrab. Tak heran ketika dilakukan pemilihan pegawai terfavorit, ia menjadi juara.

Nilai tambah yang bisa kita berikan, seringkali, hal-hal kecil yang membawa perbedaan bagi orang lain. Menahan diri dari memainkan gawai ketika ada seseorang yang berbicara empat mata dengan kita, menyapa hangat terlebih dahulu seseorang yang berpapasan dengan kita, bisa jadi merupakan hal-hal sepele. *But, sometimes, little things can make big impact, can't they?*

Stephen Covey, penulis buku

fenomenal “The 7 Habits of The Highly Effective People” memperkenalkan tentang konsep Rekening Bank Emosi (RBE), yaitu catatan kesan atau penilaian dalam ingatan seseorang mengenai orang lain. Jika seseorang melakukan hal menyenangkan menurut Anda, saldo RBE-nya akan bertambah. Begitu juga sebaliknya.

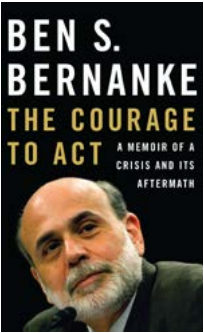
Tidak ada hal yang benar-benar sepele jika dengan melakukannya, saldo RBE Anda di mata orang lain bisa bertambah. Memuji secara tulus bahwa potongan rambut baru rekan kerja membuatnya tampak lebih muda, memberikan pengantar singkat di surat elektronik alih-alih mengirimkan lampiran saja, dan hal-hal sederhana lain yang bisa Anda lakukan.

Hal-hal sederhana yang bisa mengukir senyum di wajah seseorang, menghangatkan hatinya, atau meningkatkan kepercayaan dirinya. Percayalah bahwa membuat seseorang *merasa lebih baik* akan membuat Anda lebih baik.

Teks Monika Yulando Putri



Foto Arif K.



Judul: The Courage to Act: A Memoir of a Crisis and Its Aftermath
Pengarang: Ben Bernanke
Penerbit: W. W. Norton & Company
Tahun Terbit: 2015
Deskripsi Fisik: 640 + xiv halaman
ISBN: 9780393247213 (edisi cetak)
9780393247220 (edisi e-book)

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

- Perpustakaan Kemenkeu
- Perpustakaan Kementerian Keuangan
- @kemenkeulib

www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

5 Buku Fiksi Terpopuler

- Hujan Tere Liye
- Intelegensi Embun Pagi Dewi Dee
- 100 Tokoh Yang Mewarnai Jakarta: Lagak Jakarta Beni Mice
- 9 Summers 10 Autumns Iwan Setyawan
- Dilan : Dia adalah Dilanku Tahun 1990 Pidi Baiq

5 Buku Non-Fiksi Terpopuler

- Panduan Resmi Tes TPA Oto Bappenas - Dedy Gunarto
- Happy Little Soul Retno Hening
- TOEIC Practice Exams Lin Lougheed
- Hidup 100 Tahun dengan Food Combining Andari Sakhi
- Bagaimana Perekonomian Tumbuh dan Mengapa Runtuh Peter D

The Courage to Act

Dr. Ben S. Bernanke sebelum menjadi Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve System atau biasa disingkat The Fed) adalah dosen ilmu ekonomi yang banyak menulis buku tentang ilmu ekonomi makro. Selain menjadi anggota Dewan Gubernur, Bernanke juga banyak terlibat dalam Federal Reserve Banks di beberapa Negara Bagian Amerika Serikat. Bernanke menjabat sebagai Dewan Penasihat Ekonomi (Council of Economic Advisers, CEA) pada masa pemerintahan Presiden George Walker Bush dan Presiden Barack Obama, yakni sejak 1 Februari 2006 hingga 31 Januari 2014. Seperti tidak ingin lepas dari dunia akademisi, dalam kurun waktu kepemimpinannya itu dia juga memberikan serangkaian ceramah yang kemudian dibukukan dengan judul *The Federal Reserve and the Financial Crisis* (2015) yang sebagian diuraikan dalam buku memoirnya ini.

Sejalan dengan judul buku ini (*The Courage to Act*), dalam pengantarnya Bernanke menyebutkan bahwa dalam semua krisis selalu ada orang-orang yang berani bertindak dan ada orang-orang yang takut untuk bertindak. Pada tahun 1930-an, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang disebut ‘Great Depression’. Saat itu,

para pemimpin Federal Reserve dan bank-bank sentral dunia lainnya tetap bersikap pasif sehingga berakibat pada depresi, peningkatan pengangguran dan menurunnya penghasilan atau pendapatan masyarakat.

Karena itu, ketika krisis yang serupa terjadi pada tahun 2007 – 2009, dia sebagai pemimpinnya berani bertindak untuk melakukan hal-hal yang dianggap diperlukan meskipun untuk itu mereka dikritik habis dan dipersalahkan (dalam buku ini digunakan istilah *unorthodox policy* atau *unorthodox effort*). Akan tetapi, seperti diakuinya, keberanian bertindak tersebut bukan dilakukannya sendiri di The Fed, melainkan bersama-sama dengan para pemimpin di Departemen Keuangan serta para pihak yang terkait dengan bank-bank sentral dan Departemen Keuangan di belahan dunia lainnya.

Buku ini layak dibaca para pembuat kebijakan fiskal dan moneter karena sarat dengan pembelajaran dalam menghadapi situasi ekonomi yang kurang baik (krisis). Foto Bernanke bersama Presiden Barack Obama dan ucapan terima kasih Presiden serta keterangan bahwa dirinya tidak ingin lagi dicalonkan menjadi Gubernur The Fed untuk periode ketiga juga menjadi pembelajaran tersendiri bahwa *enough is enough*.

Peresensi Anies Said Basalamah, Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM Kementerian Keuangan

Berkelana ke Puncak Anjani

“But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts.” Lantunan lagu The Chainsmokers dan Coldplay mengiringi langkah saya membelah Savana Sembalun Gunung Rinjani. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Rinjani adalah tempat persemayaman Dewi Anjani. Gunung ini merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dengan ketinggian 3.726 mdpl.

Perjalanan kali ini terasa berbeda. Kami seperti menjadi tamu di negeri sendiri. Pasalnya sebagian besar pendaki saat itu adalah wisatawan mancanegara yang mayoritas berasal dari Malaysia, China, dan Belanda. Ditengah meningkatnya animo wisata pendakian, Rinjani seolah menjadi pusat perhatian yang menawarkan sejuta keindahan.

Terdapat tiga rute jalur pendakian yaitu jalur Sembalun, Senaru, dan Torean. Jalur Sembalun agak panjang dengan elevasi yang datar. Udaranya lebih panas karena melalui padang savana yang terik. Jalur Senaru didominasi tanjakan tanpa jeda. Udaranya lebih sejuk karena melalui hutan. Dari kedua lokasi ini membutuhkan waktu jalan kaki sekitar 7 jam menuju bibir punggungan. Kebanyakan pendaki memulai pendakian melalui jalur

Sembalun dan mengakhiri melalui jalur Senaru. Jalur torearan relatif jarang dilalui karena medannya yang curam.

Uji Stamina di Tujuh Bukit Penyesalan

Jalur yang panjang dan melelahkan, itulah yang terlintas di benak saya ketika mendaki di Tujuh Bukit Penyesalan. Jalur bukit penyesalan dapat ditempuh kurang lebih 4-5 jam dari pos 3. Bukit penyesalan adalah penghubung antara padang savana dan pelawangan Sembalun yang menjadi titik awal menuju ke puncak atau biasa disebut *summit attack*. Pengaturan nafas dan langkah serta penggunaan *treking pole* sangat membantu dalam menaiki tanjakan demi tanjakan. Dari bukit penyesalan akan terlihat panorama Sembalun dengan batas cakrawala dari kejauhan.

Summit Attack Rinjani

“Ayo sudah jam 12 malam, *summit attack!*”, kata seorang kawan membangunkan kami. Menuju puncak Rinjani membutuhkan waktu sekitar 4-7 jam dari Plawangan Sembalun. Jalur pendakian didominasi kerikil dan pasir dengan elevasi di atas 60 derajat. Perlu kehati-hatian saat melewatinya karena di kiri dan kanan jalur terdapat jurang ke arah kawah.

Beberapa kali langkah kami terhenti karena lelah dan kedinginan.

Mengonsumsi makanan berkalori tinggi sangat dianjurkan untuk menjaga asupan tenaga selama pendakian. Mendekati puncak tanjakan jalur yang kami lewati semakin terjal dan berpasir halus. Dari sini kami dapat melihat bayangan Gunung Tambora serta kepulauan Sumbawa di sebelah timur. Kami juga dapat melihat Gunung Agung di Bali, pelabuhan Lembar, Segara Anakan, serta Gunung Baru Jari di sebelah barat. Sementara itu, jika menoleh ke arah utara, kami bisa melihat kawah gunung Rinjani yang sudah tidak aktif lagi.

Berkemah di Danau Segara Anak

Ada yang kurang rasanya ketika tidak bermalam di Danau Segara Anak. Danau ini terbentuk dari bekas kawah dengan kedalaman 230 meter. Danau Segara kaya akan ikan. Banyak pendaki dan masyarakat setempat yang memancing di sana. Bagi yang ingin melepas lelah dapat berendam di sumber mata Air Kalak. Dalam bahasa setempat Air Kalak berarti air panas. Air Kalak dapat dicapai dengan berjalan kaki kurang lebih 15 menit dari perkemahan dengan menyusuri danau yang bermuara pada air terjun dan kolam pemandian air panas.

Teks dan foto Prasasta Adi Putra, Pegawai KPKNL Jambi



Pendakian Menuju Puncak Anjani

Hati-Hati Menyebarkan Informasi

Foto
Anas nur Huda

Terjun menjadi seorang presenter di stasiun televisi merupakan suatu pekerjaan yang tidak pernah dibayangkan oleh Nurul Cinta sebelumnya. Cinta, panggilan akrabnya, mengenal dunia pertelevisian dari ajang gadis sampul. Semenjak itu, ia ditawarkan oleh tv lokal 'Semarang TV' untuk menjadi pembawa berita. Meski belum berpengalaman, ia bersyukur dapat belajar dan memperoleh pengetahuan baru di bidang *broadcasting*. Selain itu, ia juga pernah berkiprah sebagai presenter pada beberapa stasiun tv besar seperti TV One dan Indosiar.

Menjadi presenter bukan berarti halangan untuk menuntut ilmu lebih tinggi. Tidak tanggung-tanggung, jurusan hukum menjadi pilihan dalam jenjang sarjana dan magisternya. Ditanya alasannya, Cinta menjawab bahwa materi jurnalistik yang sering ia bawaan sering bersinggungan dengan dunia hukum, sehingga ia merasa sangat terbantu dengan latar belakang akademisnya. Ia sempat mengidolakan presenter senior Metro TV Fessy Alwi karena memiliki kesamaan karakter dengannya. Ahli hukum tidak harus berkulat sebagai pengacara atau advokat, tetapi di bidang jurnalistik pun mereka bisa mengulas dan menyampaikan secara lebih dalam suatu kasus hukum dengan berbagai perspektif.

Sebagai presenter berita terkait dengan hukum, Cinta sering harus berhadapan dengan berbagai berita dan kejadian kriminal yang sadis. Ia sempat merasa kaget dan tidak tega untuk membacakan berita pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya. Berangkat dari situ, ia berprinsip bahwa tugasnya sebagai penyambung informasi memiliki peran besar dalam mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum, serta membangun moral di masyarakat. "Jadi buat apa membaca berita kalau malah membuat orang berbuat tidak baik. Harusnya membuat si pelaku tindak kejahatan itu tidak berbuat hal tersebut. Oh, ternyata efek jeranya seperti ini, lho. Misalnya penjara, atau kalau dibandingkan di negara lain harus dihukum mati", jelasnya memberi contoh.

Hukum erat kaitanya dengan negara, dan negara berhak memungut pajak dari rakyatnya. Filosofi itu juga mengajarkan



Cinta agar selalu mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, kalau masyarakat sudah taat wajib pajak dan bayar pajak tepat waktu, pasti masyarakat akan menikmati hasilnya sendiri, seperti pembangunan jalan dan fasilitas publik lainnya.

Terkait berita palsu atau hoax yang sering beredar akhir-akhir ini, Cinta mempunyai tips agar masyarakat memperbanyak *update* berita setiap harinya dan tidak hanya menggunakan satu sumber saja. Misalnya ketika ada berita yang tidak tahu benar salahnya, alangkah lebih baik mencari informasi lain dari sumber yang lebih dipercaya dan membandingkannya. Selain itu, Cinta juga mewanti-wanti agar masyarakat tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. "Ya karena itulah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada. Yang menyebarkan saja bisa kena pidana. Setidaknya, semoga hal itu bisa menjadi salah satu ancaman bagi orang agar tidak gampang menyebarkan berita yang belum tentu benar", ungkapnya.

Teks Abdul Aziz



THE WORLD IS COMING TO INDONESIA

The IMF-WB Annual Meetings will be held for the first time in Nusa Dua Bali, Indonesia.

On October, 8th – 14th, 2018

IMF-WB ANNUAL MEETINGS 2018

The IMF-WB Annual Meetings aim to discuss the global financial and economic progress, as well as current issues, such as: **poverty eradication and sustainable economic development.**

PARTICIPANTS

Around 12,000 up to 15,000 people will attend the meeting, including

About 3,500 delegation members from 189 member countries of IMF-WB.

Roughly 1,000 media representatives.

More than 5,000 visitors and special guests drawn primarily from private business, the banking community, academic institution, local and international press, international NGO, and also observers and parliament members.

Staffs of IMF-WB also participate in the meetings with government delegation officials.

IMF-WB PLENARY SESSION

President of the Republic of Indonesia is scheduled to attend and deliver a speech in front of all the participants.

OTHER OFFICIAL EVENTS

• BRICS Multilateral Meeting

• Seminars on issues over economics and finance held by other financial institutions.

MAIN EVENTS

The International Monetary and Financial Committee (IMFC)

The IMFC consists of 24 central bank governors from IMF member countries, all of whom will be present during this session to discuss worldwide economic issues as well as provide advice for future IMF work programs. During this meeting, the Bank of Indonesia Governor will represent 13 South East Asia Voting Group (SEAVG) countries.

World Bank Development Committee (DC)

The World Bank Development Committee, of which consists of 24 ministers of finance from IMF-World Bank member countries, has the task of providing advice to IMF-WB Board of Governors about economic growth in developing countries. As the president of the World Bank Development Committee, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia will lead the meeting attended by Ministers of Finance from 189 countries, private executives, and senior management from the IMF and the World Bank.

**MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE-72
17 AGUSTUS 2017**

Foto Arief Kuswanadji

